



BAB 10

Prospek Perekonomian dan Arah Kebijakan

Prospek perekonomian Indonesia akan lebih baik ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga. Prospek ini adalah hasil dari sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, serta otoritas lain yang makin solid dan secara konsisten melanjutkan reformasi struktural, sehingga menempatkan Indonesia pada kategori negara berpendapatan menengah atas.

Bab 10

Prospek Perekonomian dan Arah Kebijakan

Prospek perekonomian Indonesia 2019 akan lebih baik, meskipun perekonomian global yang belum kondusif perlu terus mendapat perhatian. Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia berlanjut dalam kisaran 5,0%–5,4%, ditopang permintaan domestik yang kuat. Ketahanan eksternal juga makin kuat didukung defisit transaksi berjalan (TB) yang turun menjadi sekitar 2,5% dari produk domestik bruto (PDB), serta aliran masuk modal asing yang kembali meningkat. Stabilitas harga juga terkendali dimana inflasi diperkirakan dalam kisaran sasaran 3,5±1%. Stabilitas sistem keuangan juga terjaga dan ditopang intermediasi yang membaik dengan kredit pada 2019 diperkirakan tumbuh sebesar 10%–12%.

Perekonomian domestik dalam jangka menengah diperkirakan berada dalam lintasan yang meningkat. Prospek ini sejalan dengan dampak positif berbagai reformasi struktural yang ditempuh yang diperkirakan dapat meningkatkan efisiensi perekonomian dan mendorong kenaikan kapasitas perekonomian. Struktur perekonomian juga lebih berdaya tahan serta ditopang sumber pembiayaan yang lebih permanen dan sehat. Prospek perbaikan struktur ini pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi meningkat dalam kisaran 5,5%–6,1% pada 2024. Sejalan dengan kondisi tersebut, ketahanan eksternal makin baik tergambar pada defisit TB yang terus menurun dan inflasi yang makin rendah.

Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta otoritas lain makin solid guna memperkuat prospek perekonomian Indonesia. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter, kebijakan sektor keuangan, dan fiskal tetap diarahkan pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, dengan tetap memanfaatkan ruang yang tersedia untuk stimulus pertumbuhan ekonomi. Stimulus perekonomian tersebut termasuk mengoptimalkan peran kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, serta ekonomi dan keuangan syariah. Stabilitas sistem keuangan juga diperkuat melalui koordinasi dan pengawasan yang erat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),

termasuk dalam pencegahan dan penanganan krisis keuangan.

Sinergi kebijakan juga ditempuh untuk konsisten melanjutkan reformasi struktural melalui empat strategi utama. Pertama, strategi meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Upaya ini dilakukan melalui penguatan empat elemen dasar yakni ketersediaan infrastruktur, kualitas modal manusia (*human capital*), adopsi teknologi, dan dukungan kelembagaan. Kedua, strategi untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas sektor industri. Ketiga, strategi mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi digital. Terakhir, strategi untuk memperluas sumber pembiayaan ekonomi.

10.1. Perekonomian Global Belum Kondusif

Perekonomian global pada 2019 diperkirakan belum kondusif, terutama akibat pertumbuhan ekonomi global yang belum kuat. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melandai yakni 3,6%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 3,7%. Perkembangan ini perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi kinerja perekonomian domestik melalui jalur perdagangan.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai terutama dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi negara maju, seperti Amerika Serikat (AS), kawasan Eropa, dan Jepang (Tabel 10.1). Prospek pertumbuhan ekonomi AS yang

Tabel 10.1. Proyeksi Pertumbuhan PDB Dunia

Persen

Negara/Kelompok Negara	2018	Proyeksi 2019
PDB Dunia	3,7	3,6
Negara Maju	2,3	1,9
Amerika Serikat	2,9	2,3
Eropa	1,8	1,5
Jepang	0,9	0,8
Negara Berkembang	4,6	4,6
Tiongkok	6,6	6,4
India	7,5	7,6

Sumber: IMF, CF, diolah

melambat seiring dengan berakhirnya dampak stimulus fiskal dan kemungkinan berlanjutnya ketegangan perdagangan dengan beberapa mitra dagang, terutama Tiongkok. Ekonomi Eropa diperkirakan juga tumbuh melambat karena kinerja ekspor yang menurun dan permasalahan struktural terkait tenaga kerja. Perlambatan ekonomi Jepang yang berlanjut dipengaruhi berkurangnya stimulus fiskal dan menyusutnya angkatan kerja.

Di tengah ekonomi negara maju yang tumbuh melambat, perekonomian negara berkembang diperkirakan stabil, terutama ditopang oleh akselerasi perekonomian India yang berlanjut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi India dipengaruhi dampak reformasi struktural dan akselerasi proyek infrastruktur yang berdampak positif pada perekonomian India dalam jangka menengah panjang. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan melambat seiring dengan berlanjutnya proses *rebalancing* dan *deleveraging*, serta dampak ketegangan perdagangan dengan AS.

Prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat berdampak negatif pada volume perdagangan dunia. Volume perdagangan dunia diperkirakan kembali tumbuh melambat pada 2019 menjadi sekitar 3,4%. Perlambatan volume perdagangan dunia juga tidak terlepas dari belum meredanya ketegangan perdagangan antara AS dengan Tiongkok dan beberapa negara mitra dagang lainnya.

Perlambatan ekonomi global dan ketegangan perdagangan yang berlanjut juga berdampak pada harga komoditas global yang diperkirakan masih melanjutkan tren penurunan. Harga komposit komoditas ekspor Indonesia diperkirakan kembali turun sekitar 3,1%, terutama disebabkan oleh penurunan harga batubara, tembaga, nikel, dan aluminium (Tabel 10.2). Sementara itu, harga minyak dunia (Minas) diperkirakan berkisar 63 dolar AS per barel seiring dengan pasokan yang meningkat dari AS.

Di tengah prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai, arah kebijakan moneter negara dunia, termasuk kebijakan the Fed tetap perlu mendapat perhatian. Sejauh ini, normalisasi kebijakan moneter negara maju diperkirakan tidak seagresif tahun 2018. Kenaikan suku bunga kebijakan Federal Funds Rate (FFR) diperkirakan masih dilakukan oleh bank sentral AS pada 2019 sebanyak satu kali, jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan FFR pada tahun sebelumnya yang

Tabel 10.2. Proyeksi Perkembangan Harga Komoditas

Persen

Jenis Komoditas	2018	Proyeksi 2019
Tembaga	6,7	-3,8
Batubara	2,5	-9,8
<i>Palm Oil</i>	-19,2	0,4
Karet	-16,8	2,2
Nikel	27,8	-3,7
Timah	0,5	1,2
Aluminium	7,4	-5,6
Kopi	-15,4	-4,1
Lainnya	1,2	-0,3
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia Nonmigas (IHKEI NM) 8	-4,4	-4,3
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia Nonmigas (HKEI NM) Total	-2,8	-3,1

Sumber: WEO (IMF), Bloomberg, diolah

sebanyak empat kali. Pengurangan neraca bank sentral AS juga diperkirakan lebih kecil dari yang direncanakan sebelumnya. Sementara itu, European Central Bank (ECB) diperkirakan mempertahankan tingkat suku bunga rendah pada 2019.

Faktor global lain yang dapat memengaruhi prospek perekonomian domestik adalah ketidakpastian di pasar keuangan global. Risiko ketidakpastian pasar keuangan global perlu terus mendapat perhatian karena dapat mendorong tingginya premi risiko investasi ke negara berkembang. Bila kondisi ini terjadi, dapat kembali memicu pembalikan aliran modal dari negara berkembang dan berdampak pada kondisi likuiditas negara berkembang. Beberapa kondisi yang dapat memengaruhi ketidakpastian pasar global antara lain kemungkinan berlanjutnya tensi perdagangan antara AS dengan Tiongkok. Persepsi risiko di pasar keuangan global dan sentimen negatif juga rentan dipicu oleh kerentanan ekonomi di negara berkembang lain, seperti pemburuan ekonomi di Argentina dan Turki pada 2018 yang dampaknya juga menyebar ke negara berkembang lainnya.

10.2. Perekonomian Domestik Tetap Kuat

Di tengah kondisi perekonomian global yang belum kondusif, perekonomian domestik 2019 tetap kuat ditandai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan stabilitas yang terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan tetap solid pada kisaran 5,0%–

5,4% ditunjang oleh permintaan domestik yang tetap kuat, baik konsumsi maupun investasi (Tabel 10.3). Sementara itu, kinerja ekspor neto belum banyak dapat menopang peningkatan pertumbuhan ekonomi 2019 sejalan dengan pertumbuhan perekonomian dunia yang melandai.

Konsumsi swasta diperkirakan tumbuh kuat, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi 2019. Konsumsi swasta diperkirakan tumbuh dalam kisaran 5,2%–5,6% pada 2019 dipengaruhi tingginya konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR).¹ Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap kuat didukung daya beli masyarakat yang terjaga, seiring dengan pendapatan yang membaik disertai inflasi yang rendah, serta dampak positif dari penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Peran stimulus fiskal pemerintah baik melalui bantuan sosial (bansos) maupun instrumen fiskal lainnya juga berperan menopang kinerja konsumsi rumah tangga. Kinerja konsumsi swasta juga bersumber dari peningkatan kinerja konsumsi LNPR sebagai dampak positif dari pengeluaran terkait penyelenggaraan Pemilu 2019.

Stimulus fiskal oleh Pemerintah turut menopang tetap kuatnya konsumsi swasta. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019, Pemerintah menambah alokasi anggaran untuk memberikan jaminan perlindungan sosial terutama bagi 40% penduduk termiskin. Pemerintah meningkatkan anggaran Program Keluarga Harapan dari 17,3 triliun Rupiah menjadi 34,1 triliun Rupiah, dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 10 juta jiwa. Di samping itu, Pemerintah juga memperluas penerima bantuan iuran (PBI) dari 92 juta menjadi 97 juta orang serta menambah cakupan penerima beasiswa program Indonesia Pintar dan Bidikmisi. Pemerintah mempertajam alokasi

subsidi energi dan nonenergi untuk menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, peningkatan alokasi anggaran dana desa diarahkan pada peningkatan kapasitas pendapatan dan daya beli masyarakat desa (Grafik 10.1).

Penanaman modal tetap bruto (PMTB) diperkirakan tetap tumbuh tinggi, terutama didorong peningkatan investasi nonbangunan. Pertumbuhan PMTB pada 2019 diperkirakan berada dalam kisaran 6,4%–6,8%. Proyeksi tersebut sejalan dengan kinerja ekspor yang diperkirakan masih positif dan penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur. Pertumbuhan investasi nonbangunan, khususnya berupa mesin dan peralatan, diperkirakan berada dalam rentang 8,1%–8,5%. Pertumbuhan investasi nonbangunan yang tinggi tersebut juga terkait dengan komponen nonbangunan dari proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah diperkirakan terus melanjutkan penyelesaian proyek infrastruktur, khususnya proyek strategis nasional (PSN). Pada 2019, diperkirakan terdapat tambahan sekitar 31 proyek yang dapat diselesaikan oleh Pemerintah. Di samping itu, ada tambahan sekitar 25 proyek yang dalam tahap konstruksi dan akan mulai beroperasi (Grafik 10.2).

Prospek ekspor neto diperkirakan belum cukup kuat dalam menopang pertumbuhan ekonomi 2019. Satu sisi, kondisi ini diperkirakan oleh kinerja ekspor yang tidak setinggi tahun 2018 sejalan kondisi global yang tidak menguntungkan. Ekspor 2019 diproyeksikan tumbuh dalam kisaran 4,4%–4,8% dipengaruhi volume perdagangan global yang melambat dan harga komoditas global yang turun. Sisi lain, impor juga diperkirakan

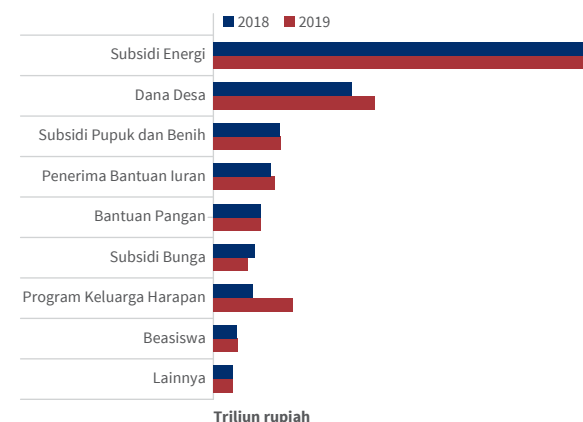
Tabel 10.3. Proyeksi Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran

Komponen	Persen	
	2018	Proyeksi 2019
Produk Domestik Bruto	5,2	5,0 - 5,4
Konsumsi Swasta	5,1	5,2 - 5,6
Konsumsi Pemerintah	4,8	3,7 - 4,1
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,7	6,4 - 6,8
Ekspor Barang dan Jasa	6,5	4,4 - 4,8
Impor Barang dan Jasa	12,0	7,1 - 7,5

Sumber: BPS dan Bank Indonesia

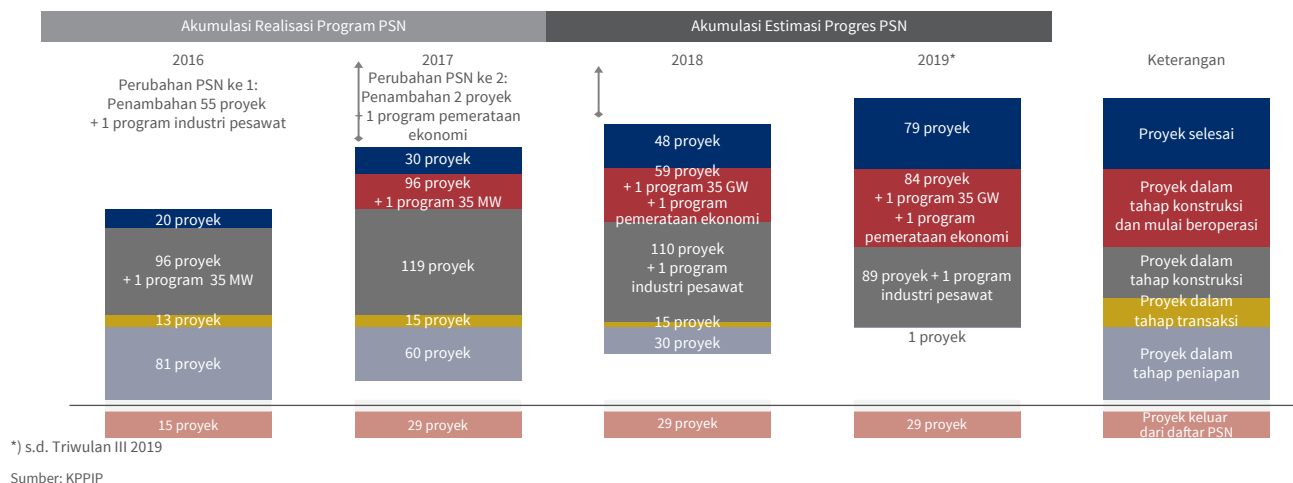
1 Konsumsi swasta terdiri dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPR.

Grafik 10.1. Alokasi Subsidi dan Bansos dalam APBN



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 10.2. Estimasi Penyelesaian Proyek Strategis Nasional



melambat yakni tumbuh dalam kisaran 7,1%–7,5%. Prospek impor ini sejalan dengan prospek ekspor serta dampak positif kebijakan pengendalian TB pemerintah seperti perluasan penerapan B20 dan insentif fiskal untuk akselerasi pengembangan industri hulu.

Berdasarkan lapangan usaha (LU), prospek PDB banyak dipengaruhi permintaan domestik. Lapangan usaha industri pengolahan, yang merupakan LU dengan pangsa terbesar dalam perekonomian, diperkirakan membaik pada 2019 ditunjang oleh permintaan domestik yang kuat. Pertumbuhan LU industri pengolahan diperkirakan berada dalam kisaran 4,3%–4,7%, seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah dalam peningkatan daya saing industri manufaktur. Selain penguatan daya saing melalui pembangunan sistem produksi yang inovatif dan berkelanjutan, perbaikan iklim investasi, infrastruktur, dan konektivitas yang konsisten juga akan berkontribusi dalam mendorong kinerja LU tersebut. Namun, peningkatan kinerja pertumbuhan LU ini diperkirakan masih menghadapi tantangan dari kinerja industri pengolahan berbasis sumber daya alam (SDA) terkait dengan prospek harga komoditas yang diperkirakan masih terbatas pada 2019.

Prospek pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan harga komoditas global yang menurun diperkirakan akan memengaruhi LU pertanian dan LU pertambangan. Kinerja LU pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh di kisaran 3,8%–4,2% pada 2019. Kinerja LU pertanian pada 2019 masih terbatas seiring dengan prospek harga komoditas ekspor utama pertanian yang belum akan menunjukkan perbaikan signifikan. Sementara itu, LU

pertambangan dan penggalian tumbuh terbatas sekitar 1,4%–1,8% seiring dengan proyeksi harga batu bara dan beberapa logam dasar yang mengalami penurunan.

Kinerja LU lain yang berkaitan erat dengan permintaan domestik diperkirakan tumbuh tinggi antara lain LU perdagangan, hotel, dan restoran, LU konstruksi, serta LU pengangkutan dan komunikasi (Tabel 10.4). Prospek LU perdagangan, hotel, dan restoran yang tumbuh dalam kisaran 5,0%–5,4% akan dipengaruhi perkembangan konsumsi rumah tangga yang solid dan meningkatnya kegiatan pariwisata seiring dengan upaya pemerintah yang intensif dalam mendorong promosi pariwisata dan akselerasi pengembangan destinasi wisata prioritas. LU pengangkutan dan komunikasi pada 2019 diperkirakan tumbuh dalam kisaran 7,1%–7,5%. Prospek pertumbuhan LU pengangkutan dan komunikasi dipengaruhi oleh

Tabel 10.4. Proyeksi Pertumbuhan PDB Sisi Sektoral

Komponen	Persen	
	2018	Proyeksi 2019
Produk Domestik Bruto	5,2	5,0 - 5,4
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,9	3,8 - 4,2
Pertambangan dan Penggalian	2,2	1,4 - 1,8
Industri Pengolahan	4,3	4,3 - 4,7
Listrik, Gas, dan Air Bersih	5,5	5,1 - 5,5
Konstruksi	6,1	6,1 - 6,5
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5,1	5,0 - 5,4
Pengangkutan dan Komunikasi	7,1	7,1 - 7,5
Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	4,9	4,9 - 5,3
Jasa-jasa	6,8	5,6 - 6,0

Sumber: BPS dan Bank Indonesia

pesatnya perkembangan ekonomi digital terutama *e-commerce*. Sementara itu, LU konstruksi tumbuh dalam kisaran yang tinggi yakni 6,1%–6,5% pada 2019 sejalan dengan prospek investasi bangunan yang tetap solid dan percepatan penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur, terutama PSN.

Permintaan domestik yang tetap kuat juga akan mendorong beberapa LU lainnya diperkirakan tumbuh cukup tinggi. LU jasa-jasa diperkirakan tumbuh dalam kisaran 5,6%–6,0% seiring pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dan kesehatan yang terus meningkat. Disamping itu, peningkatan pengeluaran pemerintah terkait program jaminan sosial dan penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) pada 2019 juga turut mendorong pertumbuhan LU ini. LU listrik, gas dan air bersih diperkirakan tumbuh 5,1%–5,5% pada 2019. Pertumbuhan LU ini pada 2019 masih berada di atas rata-rata pertumbuhan tahunannya. Prospek perkembangan LU listrik, gas dan air bersih dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi listrik sejalan dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan ditunjang telah selesainya sebagian proyek pembangkit listrik.

Permintaan domestik yang tetap kuat diperkirakan akan mendorong perbaikan ekonomi di sebagian besar wilayah. Permintaan domestik diperkirakan tumbuh kuat di semua wilayah karena daya beli yang terjaga, peningkatan penyaluran bansos dan dana desa, dampak positif dari penyelenggaraan Pilpres dan Pileg, serta penyelesaian proyek infrastruktur. Permintaan domestik yang kuat akan mendorong kinerja LU industri pengolahan di Jawa tetap tumbuh kuat. Demikian pula halnya dengan LU perdagangan, hotel dan restoran yang diperkirakan tumbuh kuat di semua wilayah. Namun demikian, kinerja ekspor manufaktur di Jawa dan ekspor komoditas berbasis SDA di berbagai daerah di luar Jawa diperkirakan sedikit tertahan oleh permintaan global yang melambat dan harga komoditas yang menurun. Sejalan dengan penurunan harga komoditas, kinerja LU pertambangan cenderung tertahan di Sumatera, Kalimantan, serta beberapa daerah di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Neraca Pembayaran Indonesia Membaik

Prospek Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2019 diperkirakan membaik ditopang penurunan defisit TB dan kenaikan aliran masuk modal asing. Defisit TB 2019 diperkirakan turun menuju kisaran 2,5%

dari PDB pada 2019. Prospek positif ini dipengaruhi berlanjutnya berbagai kebijakan pemerintah untuk mengendalikan impor seperti perluasan penggunaan Program Biodiesel 20 (B20) yang diterapkan sejak semester II 2018 dan peninjauan kembali terhadap beberapa proyek infrastruktur yang memiliki kandungan impor yang tinggi. Pada saat yang bersamaan, berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong peningkatan ekspor manufaktur dan peran sektor pariwisata. Upaya peningkatan ekspor manufaktur ditempuh melalui penerapan paket kebijakan dan insentif untuk mendorong ekspor, serta penguatan infrastruktur pendukung. Sementara itu, upaya meningkatkan peran pariwisata antara lain ditopang upaya pemerintah untuk terus mengakselerasi pengembangan sektor pariwisata guna menarik wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung ke Indonesia.

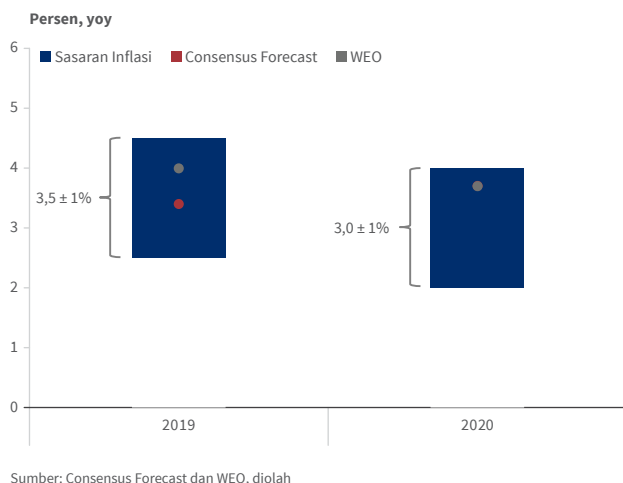
Kenaikan aliran masuk modal asing diperkirakan akan meningkatkan surplus transaksi modal dan finansial (TMF). Kenaikan aliran masuk modal asing tersebut ditunjang daya tarik aset keuangan domestik yang tetap kuat dan ketidakpastian global yang berkurang. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang makin kuat, surplus TMF diperkirakan mengalami perbaikan dan lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Surplus tersebut terutama ditopang oleh aliran investasi langsung yang meningkat seiring dengan perbaikan iklim usaha dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik. Investasi portofolio diperkirakan membaik seiring dengan ketidakpastian di pasar keuangan global yang berkurang, serta normalisasi kebijakan moneter AS dan beberapa negara maju yang diperkirakan lebih rendah pada 2019.

Inflasi Terkendali dalam Sasaran

Inflasi pada 2019 diperkirakan terkendali dalam kisaran sasaran 3,5±1%. Prospek inflasi tersebut ditopang seluruh komponen inflasi, baik inti, *volatile food* (VF), maupun *administered prices* (AP). Ekspektasi inflasi yang masih berada dalam rentang sasaran akan mendukung terkendalinya inflasi ke depan (Grafik 10.3). Terjangkarnya ekspektasi inflasi dalam rentang sasaran tersebut dipengaruhi konsistensi kebijakan moneter, sehingga mendorong pencapaian sasaran inflasi secara konsisten dalam empat tahun terakhir.

Inflasi inti pada 2019 diperkirakan terkendali sejalan dengan minimalnya tekanan harga global, kapasitas

Grafik 10.3. Proyeksi Inflasi oleh Lembaga Internasional



produksi yang memadai dalam merespons permintaan domestik, dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Prospek tekanan harga komoditas impor nonminyak dan gas (nonmigas) yang masih moderat diperkirakan berdampak positif pada minimalnya tekanan inflasi. Sementara itu, prospek permintaan yang akan tetap kuat diperkirakan masih dapat diimbangi oleh kapasitas produksi domestik yang memadai. Inflasi inti yang terkendali juga didukung oleh ekspektasi inflasi yang tetap terjangkau dalam rentang sasaran. Perkembangan inflasi dalam beberapa tahun terakhir yang berada dalam kecenderungan melambat dan konsistensi kebijakan dalam mengarahkan inflasi dalam rentang sasaran berkontribusi dalam membawa ekspektasi inflasi tetap terjangkau ke sasaran inflasi. Prospek inflasi VF dan AP pada 2019 yang terkendali juga akan berdampak positif pada minimalnya tekanan inflasi inti.

Tekanan inflasi VF diperkirakan moderat dengan didukung langkah-langkah intensif pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Pemerintah akan tetap memfokuskan kebijakan yang ditempuh pada upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif (4K). Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir guna memperkuat daya dukung infrastruktur konektivitas, infrastruktur penunjang produksi pertanian, serta pengelolaan stok pangan berperan besar dalam mendukung prospek inflasi VF yang akan tetap terkendali.

Inflasi AP diperkirakan rendah seiring dengan minimalnya rencana pemerintah terkait penyesuaian tarif dan harga

komoditas strategis. Potensi kenaikan inflasi yang bersumber dari kebijakan penyesuaian harga bahan bakar dan energi diperkirakan minimal, sebagaimana tercermin dalam postur APBN 2019. Hal ini sejalan dengan perkiraan rendahnya tekanan kenaikan harga minyak dunia pada 2019. Perkiraan ini pada akhirnya akan mendukung tetap rendahnya inflasi AP mengingat bobot bahan bakar dan energi dalam keranjang perhitungan inflasi cukup besar.

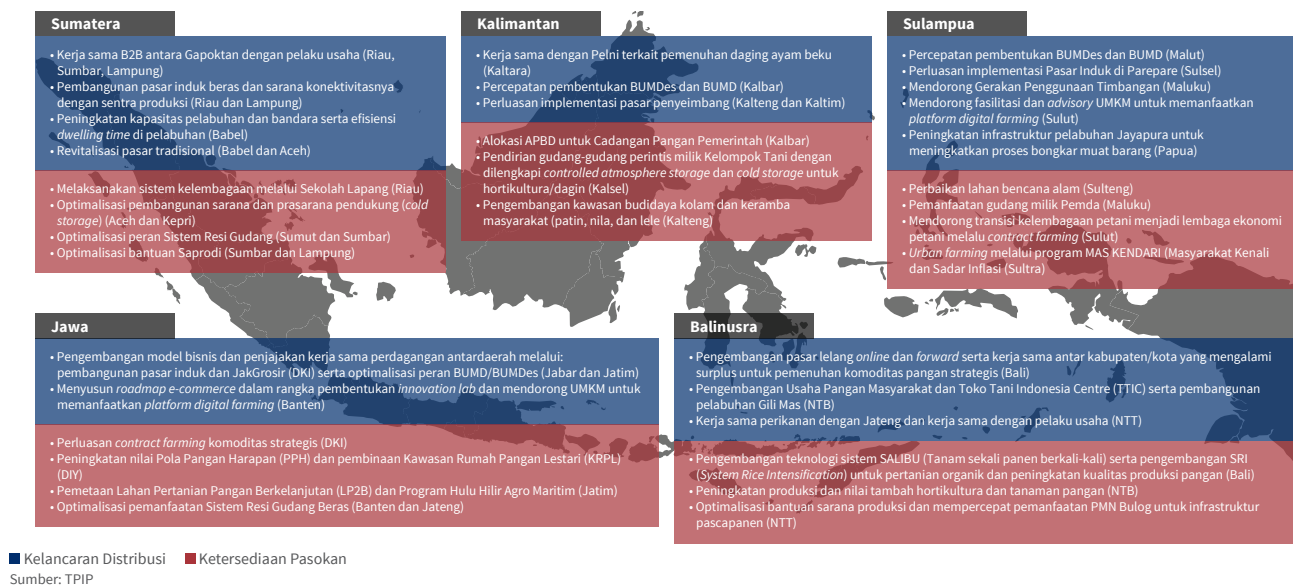
Prospek inflasi di sebagian besar wilayah diperkirakan mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional $3,5 \pm 1\%$. Perkiraan ini didukung oleh perbaikan produksi pangan yang ditunjang oleh peningkatan sarana, skema, dan teknologi produksi pertanian. Peningkatan infrastruktur seperti pelabuhan di Sumatera dan Sulampa ber dampak positif pada konektivitas, sehingga meminimalkan kendala distribusi.

Prospek inflasi daerah yang terkendali juga ditopang oleh penguatan kerja sama antar daerah dalam menjaga ketersediaan pangan antar daerah. Selain itu, koordinasi pengendalian inflasi daerah yang makin kuat melalui koordinasi TPIP dan TPID akan berkontribusi terhadap prospek inflasi yang akan terkendali. Koordinasi pengendalian inflasi akan diperkuat sejalan dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2019 – 2021 untuk pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Upaya daerah dalam pengendalian inflasi berfokus pada peningkatan aspek kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan. Kelancaran distribusi diupayakan melalui pembangunan pasar induk, revitalisasi pasar tradisional, dan peningkatan infrastruktur. Sementara itu, ketersediaan pasokan dicapai antara lain melalui penguatan kelembagaan, pembangunan gudang dan sistem resi gudang, bantuan sarana produksi, dan membentuk cadangan pangan (Gambar 10.1).

Intermediasi Meningkat, Sistem Keuangan Terjaga

Sejalan dengan prospek ekonomi domestik yang tetap baik, intermediasi perbankan diperkirakan meningkat. Pertumbuhan kredit pada 2019 diperkirakan mencapai 10%–12%, sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan mencapai 8%–10% dengan kecukupan likuiditas yang terjaga. Pertumbuhan kredit diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian. Peningkatan pertumbuhan kredit juga ditopang oleh peningkatan pertumbuhan DPK seiring dengan minat investor untuk berinvestasi ke

Gambar 10.1. Program Prioritas TPID 2019 – 2021



negara berkembang yang mulai membaik. Sementara itu, pembiayaan dari pasar keuangan diperkirakan juga membaik seiring dengan makin berkembangnya pasar keuangan domestik. Secara keseluruhan, prospek perbaikan ekonomi akan didukung oleh peningkatan pembiayaan baik melalui bank maupun nonbank.

Ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan diperkirakan tetap terjaga. Perkiraan tersebut didasarkan pada kemampuan perbankan dalam mengelola risiko kredit dengan cukup baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada rentabilitas dan ketahanan permodalan yang terjaga. Kondisi likuiditas perbankan diperkirakan juga tetap terjaga. Stabilitas sistem keuangan yang terjaga tersebut tidak terlepas dari bauran kebijakan makro-mikroprudensial yang ditempuh oleh Bank Indonesia bersama OJK.

10.3. Optimis untuk Jangka Menengah

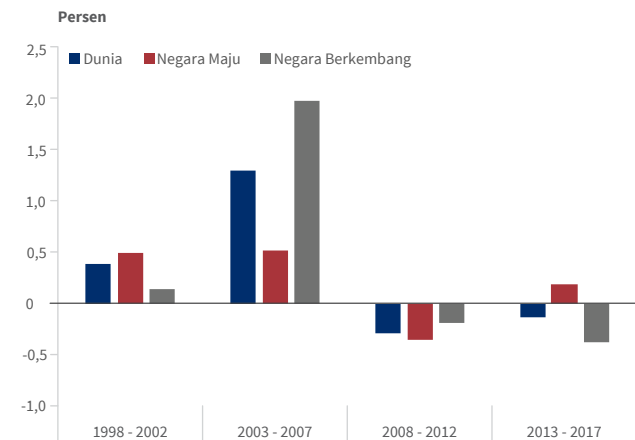
Prospek perekonomian domestik diperkirakan terus membaik dalam jangka menengah, meskipun pertumbuhan ekonomi global diperkirakan belum banyak berubah. Pertumbuhan ekonomi dunia dalam jangka menengah diperkirakan tetap berkisar 3,5% dipengaruhi pelambatan pertumbuhan produktivitas. Perkembangan terkini mengindikasikan produktivitas dunia masih berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis keuangan global (Grafik 10.4). Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh penuaan

populasi di negara maju dan investasi yang rendah, sehingga berdampak pada akumulasi kapital dan inovasi teknologi yang lambat.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat tersebut, harga minyak dunia dalam tren menurun. Penurunan harga minyak dunia juga disebabkan produksi *shale* AS dan suplai dari negara-negara anggota OPEC yang membesar. Sementara itu, harga komoditas diperkirakan tidak berubah. Adapun normalisasi kebijakan moneter AS diperkirakan berakhir pada akhir 2019.

Perekonomian Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan terus menguat ditopang peningkatan

Grafik 10.4. Produktivitas Ekonomi Dunia



Sumber: The Conference Board Total Economy Database

produktivitas dan efisiensi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat ke dalam kisaran 5,5%–6,1% pada 2024. Prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah akan diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita, sehingga menempatkan Indonesia pada kategori negara berpendapatan menengah atas.

Peningkatan produktivitas sejalan dampak positif percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan modal manusia, dan serangkaian deregulasi yang telah ditempuh. Peningkatan infrastruktur seperti pembangkit listrik, jalan tol, pelabuhan dan bandara, selanjutnya dapat menekan biaya produksi dan distribusi dan berdampak positif pada peningkatan daya saing dan kapasitas perekonomian. Selain itu, berbagai upaya deregulasi sejalan dengan reformasi struktural yang telah ditempuh turut mendorong peningkatan iklim investasi di Indonesia.

Produktivitas diperkirakan meningkat seiring dengan perbaikan iklim investasi dan dampak positif dari peningkatan daya dukung infrastruktur domestik. Produktivitas, yang tercermin pada *total factor productivity* (TFP), diperkirakan tumbuh sekitar 1% per tahun dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan juga meningkat. Peningkatan produktivitas tersebut disertai dengan akumulasi stok kapital seiring dengan peningkatan investasi. Perkiraan ini tidak terlepas dari berbagai langkah reformasi struktural yang telah ditempuh Pemerintah.

Peningkatan produktivitas juga dipengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga akan berkontribusi pada ketersediaan tenaga kerja berkeahlian tinggi. Rata-rata lama sekolah tenaga kerja diperkirakan terus meningkat secara gradual dari 8,7 tahun pada 2018 hingga mencapai 9,2 tahun pada 2024. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain melalui pengembangan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru, didukung alokasi anggaran yang makin memadai untuk pendidikan dan riset.

Perbaikan produktivitas ekonomi tersebut ditopang menguatnya struktur perekonomian, dengan menguatnya peran konsumsi swasta dan investasi, serta membaiknya kinerja ekspor neto. Konsumsi swasta dalam jangka menengah diperkirakan tetap tumbuh kuat seiring dengan prediksi peningkatan proporsi penduduk usia kerja yang merupakan bonus demografi, disertai kelas

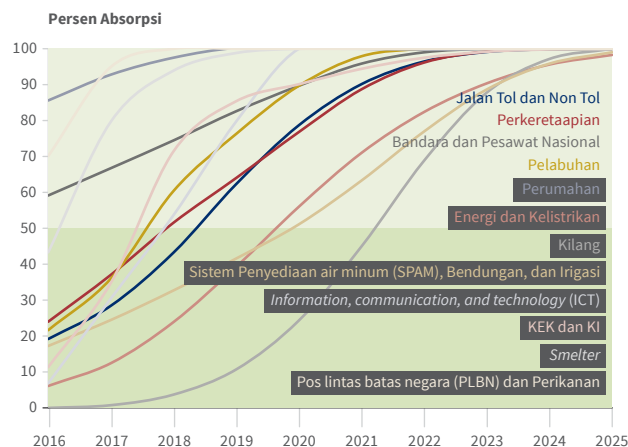
menengah yang akan terus tumbuh. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan ditunjang oleh peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan perekonomian domestik yang terus membaik.

Seperti halnya konsumsi swasta, konsumsi pemerintah juga diperkirakan terus tumbuh meningkat ditopang pendapatan negara yang meningkat. Hal tersebut sejalan dengan berbagai langkah yang ditempuh oleh Pemerintah untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara, terutama melalui perpajakan, sehingga dapat terus memberi ruang untuk peningkatan belanja yang lebih produktif.

Investasi diperkirakan tumbuh tinggi seiring dengan perbaikan iklim investasi dan ketersediaan infrastruktur. Upaya pemerintah untuk mempercepat reformasi struktural, termasuk melalui berbagai deregulasi dan penerapan paket kebijakan ekonomi, akan berdampak positif pada perbaikan daya saing dan iklim investasi. Peran investasi dalam perekonomian diperkirakan meningkat dengan rasio investasi terhadap PDB yang terus naik.

Kinerja investasi juga ditopang oleh investasi bangunan dan nonbangunan, termasuk proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai baik oleh Pemerintah maupun swasta. Hal tersebut sebagai respons atas permintaan domestik yang menguat dan prospek pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Kinerja pertumbuhan investasi nonbangunan diperkirakan melebihi investasi bangunan dalam jangka menengah. Hal ini sejalan dengan telah selesainya sebagian besar proyek infrastruktur (Grafik 10.5). Pada

Grafik 10.5. Estimasi Penyelesaian Proyek-Proyek Infrastruktur



Sumber: KPPIP, diolah

tahap penyelesaian, kebutuhan proyek infrastruktur lebih didominasi oleh komponen nonbangunan. PMTB berupa mesin dan peralatan oleh pihak swasta diperkirakan juga akan meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan domestik.

Pertumbuhan ekspor dalam jangka menengah diperkirakan meningkat didorong oleh reformasi struktural dan makin baiknya daya saing. Sejalan dengan pertumbuhan ekspor yang meningkat, pertumbuhan impor juga cukup tinggi meskipun dalam tren yang menurun. Kebutuhan impor antara lain berupa mesin, peralatan dan komponen untuk pengerjaan berbagai proyek infrastruktur, serta untuk investasi penggantian.

Pertumbuhan impor secara bertahap diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan upaya pemerintah mendorong berkembangnya industri hulu dan antara. Impor bahan baku untuk memproduksi produk ekspor dan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik diperkirakan sedikit berkurang. Impor barang konsumsi juga diperkirakan menurun meskipun konsumsi rumah tangga meningkat.

Penguatan struktur ekonomi juga tergambar dari sisi lapangan usaha dimana peran industri pengolahan diperkirakan membaik. Perbaikan pertumbuhan industri pengolahan dan pangsaanya tersebut ditunjang oleh reformasi struktural yang berkelanjutan, terutama penyediaan daya dukung infrastruktur energi dan konektivitas yang terus meningkat. Implementasi deregulasi kebijakan melalui paket kebijakan ekonomi (PKE) diperkirakan terus mendorong perbaikan iklim investasi dan daya saing ekonomi nasional. Peningkatan peran industri pengolahan juga diiringi dengan berkembangnya industri bernilai tambah tinggi yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap ekspor produk berbasis komoditas. Transformasi industri ke arah teknologi yang lebih maju juga disertai dengan integrasi yang lebih baik ke rantai pasok global.

Peningkatan peran industri pengolahan domestik juga dipengaruhi meningkatnya kebutuhan domestik yang disertai dengan perbaikan kapabilitas dan kapasitas industri. Perkembangan industri pengolahan akan banyak ditopang oleh perbaikan perekonomian domestik yang diperkirakan menguat dalam jangka menengah. Permintaan domestik yang menguat yang disertai dengan makin besarnya populasi penduduk kelas menengah membuat permintaan atas produk manufaktur meningkat

dan makin kompleks. Industri pengolahan diperkirakan meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya guna merespons kenaikan permintaan tersebut.

Dengan daya saing yang lebih baik, produk yang dihasilkan oleh industri pengolahan domestik diperkirakan mampu bersaing dengan produk impor. Langkah pemerintah dalam mendorong pengembangan industri melalui strategi penerapan Industri 4.0, akan berdampak positif pada peningkatan efisiensi dan produktivitas industri pengolahan domestik.

Perkembangan industri pengolahan tersebut pada gilirannya akan mendorong proses transformasi ekonomi dalam jangka menengah. Peran beberapa LU terkait komoditas diperkirakan menurun, seperti LU pertanian dan LU pertambangan dan penggalian. Sebagian kegiatan usaha beralih dari sektor *tradable* ke sektor *non-tradable*, seperti LU pengangkutan dan komunikasi dan LU keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan, dan kegiatan usaha lainnya beralih ke LU konstruksi. Pergeseran atau transformasi tersebut diperkirakan terjadi karena daya tarik sektor *non-tradable* yang lebih tinggi.

Beberapa faktor eksternal tetap perlu dicermati karena dapat memengaruhi prospek perbaikan peran industri pengolahan. Hal ini antara lain terkait persaingan global yang makin ketat dan pertumbuhan ekonomi global yang belum kuat. Dengan makin terbukanya perdagangan dunia, tingkat persaingan juga menjadi makin ketat. Hal tersebut membuat peningkatan penjualan ekspor produk manufaktur menjadi tidak mudah. Terlebih lagi, keterlibatan Indonesia dalam *global value chain* (rantai nilai global) perlu terus ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi global yang tidak banyak berubah diperkirakan juga berdampak pada permintaan ekspor yang terbatas atas produk manufaktur.

Ketahanan Eksternal Makin Kuat

Ketahanan eksternal Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan makin kuat seiring prospek neraca pembayaran Indonesia (NPI) yang dalam tren membaik. Kinerja NPI yang diperkirakan terus membaik ditopang oleh defisit TB yang makin menurun dan surplus TMF yang meningkat. Perbaikan sektor eksternal seiring dengan pengaruh positif dari reformasi struktural yang ditempuh oleh Pemerintah akan mendukung prospek NPI yang terus membaik. Sementara itu, rangkaian implementasi reformasi struktural akan mendorong

peningkatan produktivitas dan efisiensi perekonomian yang pada akhirnya berdampak positif pada daya saing perekonomian Indonesia. Lebih lanjut, hal ini akan mendorong peningkatan aliran modal ke Indonesia. Kombinasi berbagai faktor positif ini akan berdampak positif pada perbaikan NPI dan mendukung peningkatan cadangan devisa.

Penurunan defisit TB didorong oleh peningkatan daya saing dan ditunjang dampak positif berlanjutnya reformasi struktural. Pertumbuhan industri pengolahan berorientasi ekspor dan industri substitusi impor yang membaik seiring dengan peningkatan daya saing diperkirakan akan dapat meningkatkan surplus neraca perdagangan nonmigas. Surplus neraca perdagangan nonmigas yang makin meningkat tersebut diperkirakan dapat mengompensasi defisit neraca minyak dan gas (migas) yang menghadapi tantangan dari penurunan *lifting* migas di tengah kenaikan konsumsi domestik. Defisit neraca jasa terus mengalami penurunan seiring dengan perbaikan kinerja pelayaran domestik dan peningkatan pertumbuhan industri pariwisata. Sementara itu, peningkatan aliran investasi langsung akan mendorong defisit pendapatan primer makin meningkat. Surplus pendapatan sekunder diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dalam jangka menengah defisit TB diperkirakan menurun dan menuju di bawah 2,0% dari PDB pada 2024.

Surplus TMF dalam jangka menengah diperkirakan terus berlanjut. Aliran investasi langsung yang menjadi penopang perbaikan tersebut diperkirakan terus naik seiring perbaikan iklim investasi. Peningkatan *foreign direct investment* (FDI) dipengaruhi oleh berbagai proyek infrastruktur pemerintah dan dampak positif dari implementasi berbagai paket kebijakan ekonomi untuk peningkatan daya saing perekonomian. Sementara itu, aliran investasi portofolio diperkirakan meningkat sejalan dengan normalisasi kebijakan di negara maju yang diperkirakan berakhir. Seiring dengan kebutuhan pendanaan infrastruktur yang makin besar dan pertumbuhan ekspor-impor yang tinggi, aliran investasi lainnya juga diperkirakan cukup besar.

Inflasi Terus Menurun

Inflasi dalam jangka menengah diperkirakan tetap berada pada level yang rendah ditunjang peningkatan efisiensi dan produktivitas perekonomian. Inflasi

diprakirakan terus menurun menuju kisaran $3,0 \pm 1\%$. Inflasi inti diperkirakan relatif rendah mengingat adanya perbaikan di sisi suplai dengan kapasitas produksi yang lebih kuat dalam merespons peningkatan permintaan. Perbaikan distribusi barang dan jasa dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas, seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan prasarana pendukungnya, juga akan berdampak positif pada biaya transportasi dan logistik, sehingga berkontribusi pada penurunan inflasi. Tren inflasi yang diperkirakan menurun juga akan disertai oleh disparitas inflasi antarwilayah yang mengecil. Hal tersebut dipengaruhi oleh pasokan yang akan lebih baik sejalan dengan produktivitas sektor pertanian yang makin meningkat.

Tekanan inflasi yang rendah juga dipengaruhi harga komoditas yang stabil dalam jangka menengah. Menurut proyeksi Bank Dunia, dalam jangka menengah kenaikan harga pangan global diperkirakan terbatas, antara lain atas komoditas gandum, beras, dan daging sapi.² Prospek kenaikan harga yang terbatas ini antara lain terkait dengan: (i) perkiraan harga energi global turun, mengingat energi merupakan komponen utama dari biaya produksi komoditas pangan; (ii) ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok yang diikuti pengenaan tarif masuk komoditas pangan, sehingga menyebabkan berkurangnya permintaan dan turunnya harga komoditas pangan; (iii) tren stok pangan terhadap konsumsi yang secara umum meningkat, seperti yang terjadi pada satu dekade terakhir. Sementara itu, perkiraan harga minyak dunia yang turun dalam jangka menengah membuat perkiraan tekanan inflasi AP juga rendah.

Tren penurunan inflasi diperkirakan juga didukung oleh penurunan ekspektasi inflasi dan pergeseran konsumsi dalam jangka menengah. Ekspektasi inflasi secara umum diperkirakan terus dalam tren menurun seiring dengan tren realisasi inflasi yang turun secara bertahap dan berada dalam kisaran sasaran inflasi. Di samping itu, frekuensi gejolak pasokan barang dan jasa juga minimal karena infrastruktur yang makin baik. Sementara itu, tren peningkatan pendapatan per kapita yang diperkirakan terjadi akan mengubah pola konsumsi masyarakat, khususnya mengurangi konsumsi pangan. Kenaikan permintaan diperkirakan akan terjadi pada komoditas nonpangan, yang perubahan harganya lebih terbatas.

² World Bank Group (2018). *Commodity Markets Outlook*, October. World Bank, Washington, DC.

Hal tersebut berdampak pada perlambatan kenaikan harga secara umum dalam jangka menengah. Tentu saja keberhasilan berbagai kebijakan pengendalian inflasi juga berkontribusi dalam menurunkan ekspektasi inflasi dalam jangka menengah.

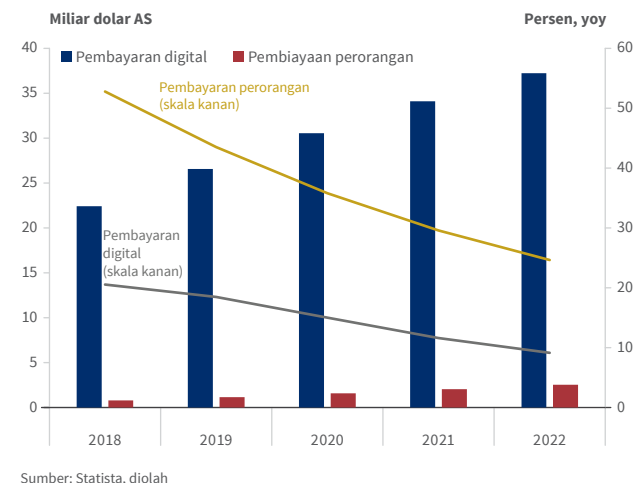
Peran Sektor Keuangan Meningkat

Seiring dengan perekonomian yang makin menguat dalam jangka menengah dan reformasi struktural yang terus berlanjut, sektor keuangan diperkirakan tumbuh dengan baik. Peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian dengan adanya reformasi struktural diperkirakan berdampak pada peningkatan aktivitas di pasar keuangan dalam menyediakan pembiayaan. Peningkatan pembiayaan ini juga didukung oleh aliran investasi portofolio yang diperkirakan meningkat sejalan dengan upaya pendalaman pasar keuangan dengan menyediakan alternatif investasi dan lindung nilai yang lebih beragam, sehingga mendorong aliran masuk modal asing. Selain itu, perbaikan kondisi perekonomian domestik juga akan mendorong volume investasi dan kelayakan kredit, yang antara lain disebabkan oleh prospek imbal hasil yang meningkat dan risiko yang menurun. Hal tersebut juga berimplikasi pada tingkat kualitas kredit dan kesehatan perbankan yang baik. Secara keseluruhan, kondisi tersebut akan mendukung stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan sektor keuangan, pendalaman pasar keuangan diperkirakan juga mengalami percepatan. Perkembangan yang terjadi dapat berupa penguatan basis investor domestik dan asing dengan skala lebih luas, peningkatan volume transaksi dan pengayaan instrumen pasar keuangan beserta produk derivatifnya. Dengan makin besarnya pasar, jalur distribusi pemasaran produk bagi investor ritel akan makin luas. Berdasarkan proyeksi Statista, selain pasar keuangan yang sifatnya konvensional, transaksi teknologi finansial (tekfin) juga diperkirakan terus meningkat walaupun melambat (Grafik 10.6). Institusi keuangan konvensional seperti perbankan diperkirakan juga akan terus mengembangkan produk dengan fitur digital.

Penguatan sektor keuangan diperkirakan menopang prospek perekonomian yang terus menguat dalam jangka menengah. Prakiraan pertumbuhan ekonomi mendorong kredit perbankan tumbuh sebesar 14%–16%. Selain dari pembiayaan sektor perbankan, pembiayaan melalui pasar modal diperkirakan akan terus meningkat.

Grafik 10.6. Proyeksi Pertumbuhan dan Nilai Transaksi Tekfin di Indonesia



Hal tersebut tak lepas dari adanya peningkatan kemampuan perusahaan dalam menerbitkan instrumen pembiayaan sendiri serta basis investor yang makin luas. Kemampuan pembiayaan pemerintah dalam mendorong perekonomian juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan lainnya. Dengan penerimaan yang makin kuat, ruang pemerintah dalam memperkuat perekonomian dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi akan makin besar.

10.4. Sinergi Kebijakan Makin Solid

Prospek ekonomi Indonesia tersebut ditopang makin solidnya sinergi kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia, Pemerintah, dan OJK, serta otoritas terkait dalam satu bauran kebijakan ekonomi yang saling memperkuat. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal tetap diarahkan pada stabilitas makroekonomi, dengan tetap memanfaatkan ruang yang tersedia untuk stimulus pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sistem keuangan juga diperkuat melalui koordinasi dan pengawasan yang erat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam KSSK, termasuk dalam pencegahan dan penanganan krisis keuangan.

Arah kebijakan ke depan tersebut sejalan dengan tiga pelajaran penting yang dipetik pada 2018 dalam upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang tinggi. Pertama, stabilitas dan ketahanan perekonomian perlu terus diperkuat dengan memastikan inflasi rendah,

nilai tukar Rupiah stabil, defisit fiskal rendah, stabilitas sistem keuangan terjaga, serta defisit TB dalam batas yang aman. Kedua, daya saing dan produktivitas harus terus ditingkatkan dengan ditopang struktur ekonomi yang kuat guna mendorong momentum pertumbuhan ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu, perlu penguatan kebijakan dan strategi untuk mendorong ekspor bernilai tambah tinggi dan mengurangi ketergantungan impor, serta mendorong investasi langsung dari dalam dan luar negeri. Ketiga, sinergi kebijakan antarotoritas menjadi kunci dalam upaya menjaga stabilitas dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Ketiga pelajaran penting tersebut menjadi acuan dalam perumusan kebijakan guna menghadapi dan memitigasi tantangan perekonomian ke depan yang mengemuka baik dari sisi global maupun domestik.

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter akan tetap ditempuh secara *pre-emptive* dan *ahead of the curve* pada 2019. Kebijakan suku bunga akan terus dikalibrasi sesuai perkembangan ekonomi domestik dan global sejalan dengan upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memastikan keberlanjutan pemulihan ekonomi domestik. Kebijakan akan secara konsisten ditempuh untuk memperkuat ketahanan eksternal, termasuk dengan mengarahkan defisit TB ke dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik.

Bank Indonesia akan terus memperkuat strategi operasi moneter guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Penguatan strategi operasi moneter ditempuh melalui tiga langkah, yaitu (i) penetapan strategi pelaksanaan lelang operasi pasar terbuka (OPT) reguler (target, frekuensi dan tenor) dilakukan dengan memerhatikan kondisi likuiditas; (ii) peningkatan fleksibilitas *fine tune operation* (FTO); dan (iii) optimalisasi Sukuk Bank Indonesia (SukBI) sebagai instrumen pengelolaan likuiditas syariah dan melengkapi tenor-tenor jangka pendek yang selama ini belum tersedia di pasar uang antarbank syariah (PUAS). Bank Indonesia juga akan terus mengoptimalkan penggunaan instrumen *reverse repo* surat berharga negara (RR SBN) untuk mendukung transmisi kebijakan moneter, serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan perbankan dan institusi terkait. Di samping itu, penerapan kebijakan giro wajib minimum (GWM) rata-rata

akan dievaluasi secara rutin dan disempurnakan secara gradual.

Langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah akan ditempuh dengan terus mendorong peningkatan efisiensi mekanisme pasar. Stabilisasi nilai tukar didukung oleh upaya menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan di pasar valas. Kebijakan stabilisasi nilai tukar ditempuh dengan didukung intervensi ganda dalam hal pasar mendapat tekanan baik di pasar valas maupun pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder. Kecukupan cadangan devisa akan terus diupayakan agar mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, pengelolaan nilai tukar juga akan dilakukan melalui inisiatif pendalaman pasar keuangan, sehingga memperkaya instrumen dan meningkatkan kedalaman pasar.

Bank Indonesia juga akan memperkuat kerja sama bilateral dengan bank sentral dan kerja sama keuangan regional dalam kerangka jaring pengaman keuangan internasional (JPKI). Kerja sama diarahkan untuk memperkuat pengelolaan cadangan devisa dalam rangka mengatasi permasalahan neraca pembayaran atau kebutuhan likuiditas jangka pendek. Selain itu, kerja sama keuangan bank sentral di kawasan juga akan diarahkan untuk memperkuat *framework* pengelolaan cadangan devisa, memperkuat manajemen likuiditas, serta mendorong pengembangan pasar keuangan domestik di kawasan. Selanjutnya, dalam rangka diversifikasi penggunaan mata uang regional dan pendalaman pasar keuangan, Bank Indonesia akan terus memperkuat dan memperluas kerja sama bilateral dengan bank sentral negara mitra untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan bilateral atau *local currency settlement* (LCS).

Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan

Bank Indonesia juga akan meningkatkan akselerasi pendalaman pasar keuangan guna mendukung stabilitas di pasar keuangan dan perluasan pembiayaan ekonomi. Dalam upaya menjaga stabilitas, Bank Indonesia akan terus mendorong inisiatif pendalaman pasar keuangan untuk memperkaya instrumen dan meningkatkan kedalaman pasar. Volume transaksi dan penggunaan instrumen *spot*, *swap*, *call spread option*, dan *domestic non-deliverable forward* (DNDF) akan terus didorong

untuk meningkatkan likuiditas, efisiensi, dan *market conduct* dalam penentuan nilai tukar Rupiah yang efisien sesuai mekanisme pasar. Di pasar uang, volume transaksi dan penggunaan instrumen repo dan *interest rate swap* (IRS) terus didorong untuk meningkatkan likuiditas, efisiensi, dan *market conduct* di pasar uang antar bank (PUAB) dalam pembentukan kurva imbal hasil (*yield curve*) di berbagai tenor. Kedalaman pasar uang akan mendukung makin berkembangnya penerbitan dan transaksi surat-surat berharga jangka panjang dalam pembiayaan ekonomi.

Pendalaman pasar keuangan juga akan diperkuat dengan penguatan infrastruktur pasar keuangan (*financial market infrastructure*). Penguatan akan ditempuh melalui penerbitan regulasi penyelenggaraan fungsi *central counterparty* (CCP) di pasar keuangan domestik untuk transaksi derivatif dalam rangka *over the counter* (OTC) *Derivative Market Reform*, pengembangan *trade repository* dalam rangka peningkatan *market surveillance*, serta penerbitan regulasi mengenai *market operator* (*electronic trading platform*-ETP) untuk meningkatkan efisiensi pembentukan harga di pasar uang dan pasar valas. Bank Indonesia juga akan berpartisipasi aktif dalam inovasi berbagai instrumen pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Untuk memperkuat efektivitas upaya pendalaman pasar keuangan ini, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan terutama dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK).

Kebijakan Makroprudensial

Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong intermediasi perbankan, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan rasio *loan to value* (LTV)/*financing to value* (FTV) kredit pemilikan rumah (KPR) secara berkala akan dievaluasi guna melihat dampak siklikal pertumbuhan KPR dalam siklus perekonomian. Kebijakan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) akan ditinjau dari waktu ke waktu untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan pembiayaan ekonomi melalui penerbitan surat-surat berharga, termasuk pada perbankan syariah.

Penguatan intermediasi ke depan juga akan diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor prioritas dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bank Indonesia terus

berupaya meningkatkan akses keuangan dan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka mendorong intermediasi perbankan yang lebih seimbang. Kebijakan yang akomodatif juga ditempuh melalui ketentuan penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) dan *countercyclical capital buffer* (CCB). Ketentuan PLM akan terus dipantau guna memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas yang lebih tinggi bagi bank, termasuk pada perbankan syariah. Instrumen CCB juga terus dioptimalkan untuk menyeimbangkan antara upaya mendorong intermediasi dan upaya memitigasi risiko.

Bank Indonesia juga akan memperkuat surveilans guna turut memastikan stabilitas sistem keuangan. Penguatan surveilans khususnya terhadap bank-bank besar dan korporasi yang memiliki pengaruh signifikan dalam sistem keuangan dan perekonomian, seperti korporasi pada sektor komoditas primer, properti, dan yang memiliki ketergantungan pada pembiayaan luar negeri. Di samping itu, asesmen makroprudensial akan terus diperkuat melalui penggunaan pendekatan *national and regional balance sheet* dalam asesmen risiko sistemik dan identifikasi ketidakseimbangan sistem keuangan. Pemantauan risiko di luar perbankan juga menjadi makin penting seiring dengan perkembangan *nonbank financing*, seperti obligasi korporasi dan tekfin.

Kebijakan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia akan terus melanjutkan peran kebijakan sistem pembayaran dalam mendukung kegiatan ekonomi dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Strategi untuk mendukung kegiatan ekonomi akan tetap diarahkan pada perluasan program elektronifikasi, serta mengoptimalkan peluang digitalisasi, khususnya pada 2019.

Perluasan elektronifikasi sistem pembayaran serta pemanfaatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia akan terus dioptimalkan. Elektronifikasi program perlindungan sosial pemerintah difokuskan untuk penyaluran bansos, serta untuk mengakselerasi akseptasi penggunaan nontunai di sektor transportasi. Bank Indonesia akan terus mendorong agar tekfin dan *e-commerce* dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Upaya untuk mendorong inovasi akan terus dilakukan melalui berbagai program *engagement*, serta pemanfaatan *regulatory sandbox* untuk area yang lebih luas. Lebih dari itu,

Bank Indonesia juga akan terus mendorong sinergi dan kolaborasi antara tekfin dan UMKM melalui program *onboarding* UMKM dan *digital village* di berbagai daerah.

Bank Indonesia juga tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pengelolaan uang Rupiah guna memenuhi kecukupannya. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan kualitas uang Rupiah, serta meningkatkan efisiensi dan jangkauan distribusi pengedaran uang ke berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk ke daerah terluar, terpencil dan terdepan (3T). Bank Indonesia akan terus memastikan pemenuhan uang Rupiah layak edar ke seluruh pelosok wilayah NKRI melalui *centralized cash network planning* (CCNP) serta melindungi masyarakat dari risiko uang palsu. Bank Indonesia memastikan pemenuhan uang kartal baik dari sisi jumlah nominal maupun pemenuhan dari sisi pecahan. Terkait dengan pecahan, Bank Indonesia senantiasa memantau preferensi dan kebutuhan masing-masing pecahan di masyarakat secara berkala. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi layanan kas dengan berbagai pihak, antara lain melalui kas titipan dengan perbankan, program Bank Indonesia-jangkau dan kas kepulauan.

Pengembangan infrastruktur, instrumen, dan mekanisme penyelenggaraan pada sistem pembayaran nontunai akan terus dilakukan, baik dari sisi nilai besar (*wholesale*) maupun ritel. Pengembangan tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan sistem pembayaran nasional yang aman, andal, efisien dan lancar. Dari sisi nilai besar, Bank Indonesia akan memperkuat ketersediaan infrastruktur pembayaran, baik di sisi kapasitas sistem maupun kualitas layanan, melalui pemanfaatan teknologi baru, peningkatan frekuensi layanan dan kecepatan pemrosesan transaksi. Selain itu, cakupan valuta yang lebih luas akan terus diupayakan guna mengefisienkan transaksi *cross-border*, khususnya ekspor.

Upaya untuk mendorong industri dari sisi ritel dilakukan melalui pengembangan instrumen dan kanal pembayaran dalam rangka mendukung efisiensi ekonomi, inklusi keuangan, serta ekonomi dan keuangan digital. Penguatan infrastruktur dan kelembagaan gerbang pembayaran nasional (GPN) akan terus dilakukan. Hal ini dilakukan dengan memperluas fasilitasi interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pembayaran, standardisasi *quick response* (QR) code oleh Bank Indonesia, serta layanan pembayaran tagihan secara elektronik (*online*

payment). Bank Indonesia juga akan mendorong pencapaian target 1 orang memiliki 1 kartu debit Garuda pada akhir 2021. Selain itu, penguatan infrastruktur juga diarahkan untuk peningkatan kapasitas sistem kliring nasional Bank Indonesia (SKNBI). Bank Indonesia juga akan terus mendorong inovasi dan kolaborasi antarpelaku di industri melalui penguatan regulasi dan penataan industri agar makin efisien, serta mampu memberikan perlindungan konsumen secara optimal.

Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah serta UMKM

Bank Indonesia akan terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mengoptimalkan potensinya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan ekosistem rantai nilai halal, khususnya makanan, pakaian dan pariwisata, dengan didukung kampanye gaya hidup halal. Kapasitas usaha syariah di lingkungan pesantren akan ditingkatkan melalui berbagai *linkage* usaha antarpesantren, termasuk melalui pengembangan *virtual market*.

Bank Indonesia juga aktif dalam mendorong pembiayaan ekonomi melalui penerbitan sukuk, terutama untuk pembiayaan infrastruktur, serta integrasi sosial-komersial dari keuangan syariah seperti pemberdayaan zakat dan wakaf produktif. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mendorong edukasi dan kampanye *halal lifestyle* melalui penyelenggaraan secara rutin festival ekonomi syariah (FeSyar) di tiga wilayah Indonesia dan Indonesia *economic sharia festival* (ISEF) bertaraf internasional (Lihat Boks 10.3 Penguatan Landasan Pengembangan Ekonomi Syariah).

Bank Indonesia turut memperluas program pengembangan UMKM yang difokuskan untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan penurunan defisit TB. Dalam konteks mendukung upaya pengendalian inflasi, pengembangan klaster UMKM diarahkan pada komoditas strategis seperti beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan sapi di berbagai daerah. Hal ini ditujukan untuk dapat mendukung kesinambungan pasokan pangan dan juga mendorong peningkatan usaha skala UMKM.

Untuk mendukung upaya penurunan defisit TB, program pengembangan UMKM diarahkan untuk klaster

yang dapat memberikan nilai tambah tinggi dengan memerhatikan keunggulan daerah, seperti UMKM dengan kegiatan usaha mendukung sektor pariwisata, kopi, serta produk tekstil. Pengembangan UMKM binaan Bank Indonesia tersebut juga akan dilakukan melalui UMKM *go digital* dan integrasi dengan usaha syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong keikutsertaan UMKM dalam berbagai pameran bertaraf nasional dan internasional.

Kebijakan Internasional

Kebijakan internasional Bank Indonesia akan dilakukan untuk memperkuat persepsi positif terhadap Indonesia dengan berperan aktif dalam perumusan kebijakan di berbagai lembaga internasional. Penguatan persepsi positif ditujukan untuk meningkatkan minat dari berbagai negara untuk menjalin hubungan dagang, investasi, dan pariwisata dengan Indonesia.

Kebijakan internasional juga akan difokuskan pada penguatan koordinasi kebijakan internasional. Kebijakan tersebut antara lain terkait kebijakan perluasan dan penguatan kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam setelmen transaksi perdagangan dan JPPI, peningkatan pembiayaan investasi khususnya untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi dan keuangan digital, serta ekonomi dan keuangan syariah.

Kebijakan ditempuh antara lain melalui peningkatan kerja sama *swap* secara bilateral maupun regional Asia dalam inisiatif Chiang-Mai, perluasan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi dengan negara lainnya. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga akan terus diperkuat untuk mengoptimalkan kerja sama dengan mitra dagang, baik dalam format *free trade agreement* (FTA), *comprehensive economic partnership agreement* (CEPA), maupun kerja sama lainnya. Peran *investor relations unit* (IRU) - *regional investor relation unit* (RIRU) - *global investor relation unit* (GIRU) juga akan ditingkatkan untuk mendorong promosi perdagangan dan investasi, serta pariwisata.

Koordinasi Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait di berbagai aspek untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang ditempuh. Koordinasi kebijakan dalam pengendalian inflasi akan diperkuat untuk mendukung terjaganya

stabilitas makroekonomi. Koordinasi melalui forum tim pengendalian inflasi nasional (TPIN) yang terdiri dari tim pengendalian inflasi pusat (TPIP), tim pengendalian inflasi daerah (TPID) provinsi, dan TPID kabupaten/kota yang selama ini telah berjalan baik akan terus ditingkatkan.

Koordinasi kebijakan diarahkan untuk membawa inflasi berada dalam tren menurun, sejalan dengan sasaran. Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga inflasi dalam kisaran sasaran, terutama dengan mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi VF maksimal pada kisaran 4%–5%.³ Pemerintah dan Bank Indonesia juga akan memperkuat pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021 dengan menempuh pula pelaksanaan peta jalan pengendalian inflasi di tingkat provinsi. Untuk mendukung hal tersebut, koordinasi pengendalian inflasi juga akan terus diperkuat untuk meningkatkan sinergi dan inovasi pengendalian inflasi guna mendukung penguatan ekonomi yang inklusif.

Koordinasi yang lebih erat akan ditempuh dalam memperkuat struktur perekonomian. Koordinasi dilakukan melalui forum rapat koordinasi dengan pemerintah pusat daerah (Rakorpusta). Ke depan, Rakorpusta akan difokuskan pada perbaikan defisit TB melalui pengembangan industri manufaktur berorientasi ekspor, pariwisata, pembiayaan investasi khususnya infrastruktur, serta pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan peran sekretariat koordinasi kebijakan dalam Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi. Sementara itu, untuk pengembangan sektor pariwisata, Bank Indonesia dan Pemerintah akan memperkuat monitoring program kerja secara bersama.

Koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis keuangan juga akan terus ditingkatkan. Koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS akan terus diperkuat dalam KSSK. Komite ini secara berkala melaksanakan pertemuan tingkat pimpinan lembaga atau *high level meeting* minimal satu kali dalam setiap triwulan, yang akan didahului dengan *deputies meeting*.

3 Strategi ini dilakukan melalui empat kebijakan utama terkait 4K. Sesuai dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021, kebijakan tersebut ditempuh dengan memberikan prioritas pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, yang didukung oleh ekosistem yang lebih kondusif serta ketersediaan data yang akurat.

Selain itu, KSSK secara berkala juga menyelenggarakan simulasi krisis nasional (Simkrisnas) guna meningkatkan kesiapan teknis, serta kesiapan koordinasi dan pengambilan keputusan pada saat krisis, termasuk kesiapan prosedur standar, dan landasan hukum. Secara bilateral, Bank Indonesia dan OJK juga akan melakukan penguatan koordinasi di bidang sistem keuangan melalui forum koordinasi makroprudensial dan mikroprudensial (FKMM). Koordinasi di bidang sistem keuangan sangat penting untuk memastikan stabilitas sektor keuangan guna mendukung terciptanya sektor ekonomi yang tumbuh kompetitif, serta struktur ekonomi yang menjadi makin berdaya tahan terutama pada saat menghadapi guncangan.

Bank Indonesia juga akan memperkuat koordinasi untuk akselerasi pendalaman pasar keuangan. Penguatan koordinasi akan ditempuh terutama melalui FK-PPPK. Koordinasi akan difokuskan pada harmonisasi regulasi perpajakan pada instrumen di pasar keuangan. Pengembangan infrastruktur pasar keuangan turut didukung penyempurnaan regulasi untuk penerapan *close-out netting*, serta inovasi berbagai instrumen pembiayaan ekonomi melalui pasar keuangan, termasuk di dalamnya program pendampingan dan fasilitasi untuk peningkatan pembiayaan infrastruktur.⁴

Upaya pendalaman pasar keuangan tersebut tetap mengacu pada strategi nasional pengembangan dan pendalaman pasar keuangan (SN-PPPK) sebagai peta jalan yang dilandasi oleh tiga pilar pengembangan, yaitu: (i) sumber pembiayaan ekonomi dan mitigasi risiko; (ii) infrastruktur pasar keuangan; dan (iii) koordinasi, harmonisasi regulasi, dan edukasi. Sementara itu, koordinasi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan digital khususnya pada 2019, akan difokuskan untuk mengoptimalkan pesatnya perkembangan teknologi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memitigasi risiko yang dapat timbul. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan OJK agar pengembangan keuangan digital di bidang sistem pembayaran dapat saling mendukung

dengan pengembangan keuangan digital di bidang intermediasi keuangan.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal akan diarahkan untuk tetap menopang stabilitas perekonomian dengan tetap mengoptimalkan upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung stabilitas perekonomian, Pemerintah tetap fokus menjaga prospek kesinambungan fiskal dengan mengelola keseimbangan primer dan defisit APBN secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, Pemerintah menargetkan keseimbangan primer dan defisit pada APBN 2019 masing-masing sebesar -0,12% dan 1,84% dari PDB. Pemerintah juga memperkuat strategi pembiayaan yang akan dilakukan melalui penggabungan dan pengembangan sumber-sumber pendanaan dan pembiayaan yang kreatif, dengan mengutamakan risiko dan biaya yang paling efisien.

Arah kebijakan fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui optimalisasi komponen belanja yang lebih produktif dan pengembangan iklim investasi yang kondusif. Stimulus perekonomian difokuskan pada program peningkatan kualitas SDM, perlindungan sosial, penyelesaian infrastruktur dan penguatan fiskal daerah. Untuk mendukung hal tersebut, anggaran pendidikan terus dijaga sebesar 20% dari APBN yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Demikian pula untuk belanja kesehatan tetap dijaga sebesar 5 persen untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bansos bagi 40% penduduk berpenghasilan rendah, termasuk menciptakan strategi inisiatif penanganan bencana alam. Sementara itu, untuk mendukung pembiayaan infrastruktur, Pemerintah akan mengutamakan berbagai terobosan melalui pembiayaan kreatif. Penguatan fiskal daerah akan dilakukan dengan mengarahkan agar belanja Pemerintah Daerah dapat ditempuh secara efektif, efisien, dan produktif untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah, serta antardaerah.

Pemerintah melakukan berbagai perbaikan agar pengelolaan fiskal ke depan makin sehat dan berkelanjutan, dengan memperkuat fungsi alokasi,

⁴ *Close-out netting* adalah sebuah metode penyelesaian transaksi secara *netting* untuk mengurangi risiko penyelesaian transaksi oleh pihak lawan transaksi. *Close-out netting* dilakukan dengan melakukan *early termination*, valuasi dan *netting*.

distribusi dan stabilisasi. Dengan penguatan tersebut, diharapkan kebijakan fiskal dapat berperan secara optimal bagi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan. Fungsi alokasi diperkuat dengan meningkatkan kualitas belanja produktif guna menstimulasi perekonomian dan penyediaan barang publik.

Fungsi distribusi kebijakan fiskal diperkuat dengan meningkatkan peran pajak sebagai instrumen redistribusi pendapatan, meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal dan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial. Hal ini mengingat persentase penduduk miskin dan kesenjangan pendapatan antar provinsi masih cukup bervariasi (Grafik 10.7). Fungsi stabilisasi diperkuat dengan menjaga keseimbangan makroekonomi, meningkatkan peran APBN sebagai alat *countercyclical* dan mendorong pengelolaan fiskal yang *prudent*. Perbaikan pengelolaan fiskal tersebut dilakukan oleh Pemerintah, antara lain dengan mengendalikan defisit anggaran, menjaga rasio utang dalam batas aman dan mendorong keseimbangan primer menuju positif.

Dalam jangka menengah, kebijakan fiskal akan secara konsisten diarahkan untuk lebih produktif, efisien, dan berkesinambungan. Pengelolaan fiskal akan dilakukan melalui tiga strategi utama. Pertama, kebijakan ekspansif akan ditempuh secara lebih terarah dan terukur untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Sejalan dengan hal tersebut, defisit anggaran diarahkan untuk kegiatan produktif dan diselaraskan dengan siklus perekonomian, serta kebutuhan untuk akselerasi pencapaian target pembangunan. Kedua, mendorong

peningkatan rasio penerimaan pajak selaras dengan kapasitas perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi dan dunia usaha. Di samping itu, upaya tersebut dilakukan dengan tetap memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis. Ketiga, mengendalikan rasio utang dalam batas aman dan terus diupayakan menurun, serta mengarahkan utang untuk kegiatan produktif.

10.5. Konsisten Melanjutkan Reformasi Struktural

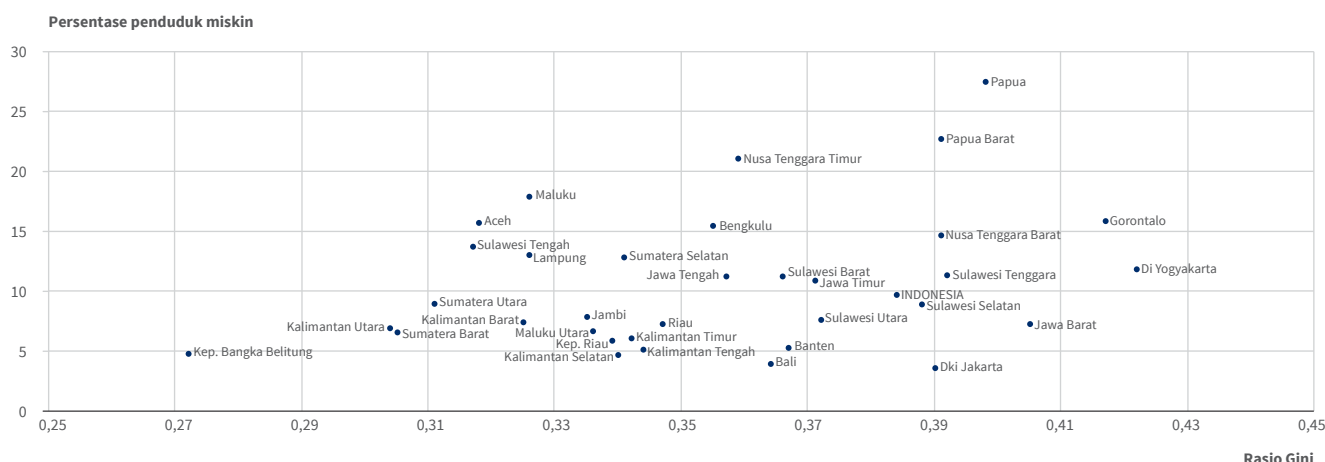
Sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, OJK, dan otoritas terkait juga ditopang konsistensi melanjutkan reformasi struktural. Reformasi struktural terus diperkuat sehingga dapat mendukung peningkatan iklim usaha dan iklim investasi. Selanjutnya, kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat struktur perekonomian, sehingga mendukung upaya pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif.

Reformasi struktural dapat ditempuh melalui empat strategi utama. Pertama, upaya meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Kedua, upaya untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas sektor industri. Ketiga, upaya mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi digital. Terakhir, upaya untuk memperluas sumber pembiayaan ekonomi.

Meningkatkan Daya Saing Perekonomian

Upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian setidaknya mencakup empat elemen dasar. Keempat

Grafik 10.7. Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi di Indonesia



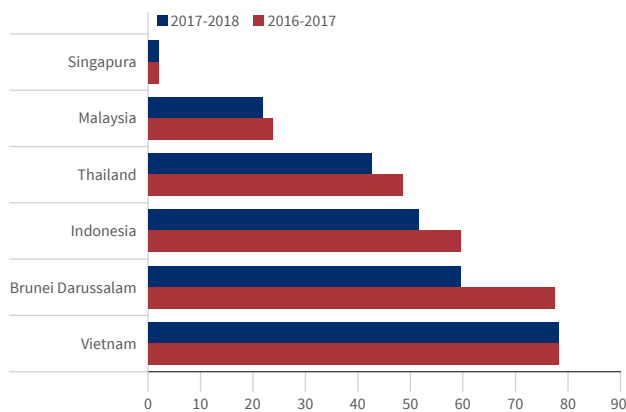
Sumber: BPS, diolah

aspek tersebut adalah ketersediaan infrastruktur, kualitas modal manusia (*human capital*), adopsi teknologi, dan dukungan kelembagaan. Keempat elemen ini saling melengkapi yang pada akhirnya akan memengaruhi kecepatan peningkatan daya saing perekonomian.

Dalam hal ketersediaan infrastruktur, Pemerintah akan terus mendorong peningkatan daya dukung infrastruktur, termasuk untuk meningkatkan konektivitas dan penyediaan energi. Peningkatan kapasitas infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan sistem logistik nasional, sehingga berdampak positif dalam pengembangan industri nasional. Peningkatan konektivitas juga akan mendorong keterhubungan antardaerah. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung konektivitas digital melalui peningkatan adopsi teknologi informasi juga terus dilakukan oleh Pemerintah agar sejajar dengan negara kawasan. Selain itu, Pemerintah juga akan melanjutkan upaya peningkatan kapasitas penyediaan energi, antara lain melalui penyelesaian pembangunan pembangkit listrik dan mendorong pencapaian target bauran energi.

Berbagai langkah telah ditempuh oleh Pemerintah agar sejajar dengan infrastruktur negara kawasan lainnya. Sejauh ini, upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur telah menunjukkan hasil positif dengan membaiknya peringkat daya saing infrastruktur (Grafik 10.8).⁵ Ke depan, berbagai penguatan infrastruktur tetap ditempuh termasuk untuk infrastruktur jalan, kereta, dan pengairan (Grafik 10.9).

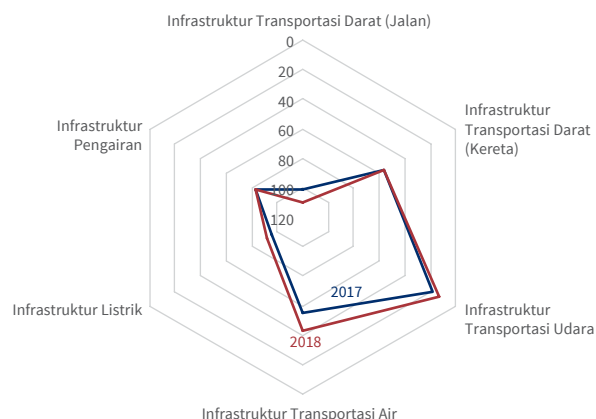
Grafik 10.8. Perbandingan Peringkat Infrastruktur



Sumber: The Global Competitiveness Report

⁵ Grafik merupakan perbandingan peringkat infrastruktur antar negara pada Global Competitiveness Report 2018. Posisi grafik batang yang lebih rendah menunjukkan peringkat yang lebih baik.

Grafik 10.9. Peringkat Kualitas Infrastruktur Indonesia



Sumber: The Global Competitiveness Report

Upaya peningkatan kapasitas infrastruktur juga akan diperluas untuk menunjang pengembangan kawasan ekonomi khusus dan pariwisata. Dalam kaitan ini, pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi akan terus didorong untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Hal ini didasarkan pada kinerja sektor pariwisata yang terus meningkat setiap tahunnya. Peran sektor pariwisata makin signifikan dalam mendukung penerimaan devisa dan dapat disejajarkan dengan devisa yang dihasilkan oleh sejumlah komoditas unggulan ekspor.

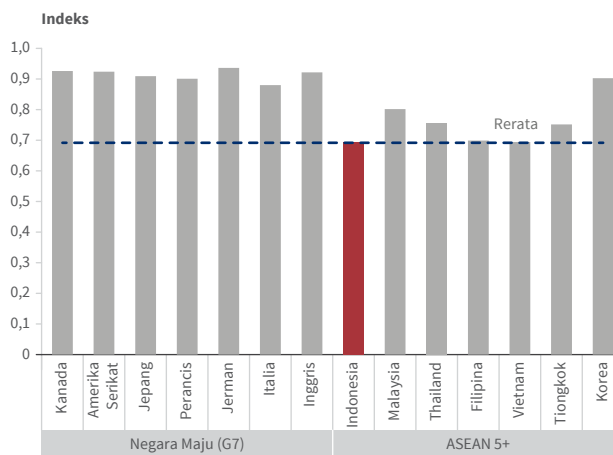
Pengembangan pariwisata menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan devisa dan mendukung penguatan neraca jasa, sekaligus mendukung penyerapan tenaga kerja yang lebih luas. Selain itu, pengembangan pariwisata juga merupakan upaya untuk diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. Ke depan, ruang peningkatan penerimaan devisa pariwisata masih terbuka seiring dengan keberadaan potensi pariwisata di berbagai daerah yang masih belum dikembangkan secara optimal (Lihat Boks 10.1 Pariwisata untuk Meningkatkan Devisa).

Dalam kaitan dengan penguatan elemen kualitas modal manusia (*human capital*), berbagai upaya terus ditempuh. Sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, Pemerintah mengupayakan pemerataan layanan pendidikan, yang diikuti dengan peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui penyediaan pendidik yang berkualitas dan merata, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik, serta penguatan literasi untuk kesejahteraan.

Upaya penguatan kualitas SDM perlu terus dilakukan. Hal ini karena peningkatan kapasitas SDM sebagai salah satu faktor produksi utama, merupakan salah satu kunci untuk menerjemahkan bonus demografi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Peningkatan ketersediaan SDM usia produktif sejalan dengan bonus demografi perlu diiringi dengan peningkatan modal manusia baik melalui penambahan lama pendidikan (masa sekolah) maupun peningkatan kualitas pendidikan. Affandi, Anugrah, dan Bary (2018) menunjukkan modal manusia berperan dalam variasi pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Indonesia, dan peran tersebut akan makin besar seiring dengan peningkatan pangsa industri pengolahan.⁶ Peningkatan kapasitas SDM tersebut dilakukan melalui konsistensi kebijakan pada penerapan wajib belajar, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan sekolah vokasi, serta peningkatan kualitas kurikulum pengajaran.

Perhatian untuk terus meningkatkan kualitas SDM juga perlu dilakukan mempertimbangkan perkembangan terkini. Tingkat pendidikan di Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami perbaikan, tetap perlu ditingkatkan, sehingga dapat sejajar dengan negara kawasan seperti Malaysia dan Filipina (Grafik 10.10). Kondisi ini pada akhirnya memengaruhi perbaikan indeks pembangunan manusia Indonesia yang cenderung menjadi terbatas, sehingga masih berada di bawah rata-rata (Grafik 10.11).

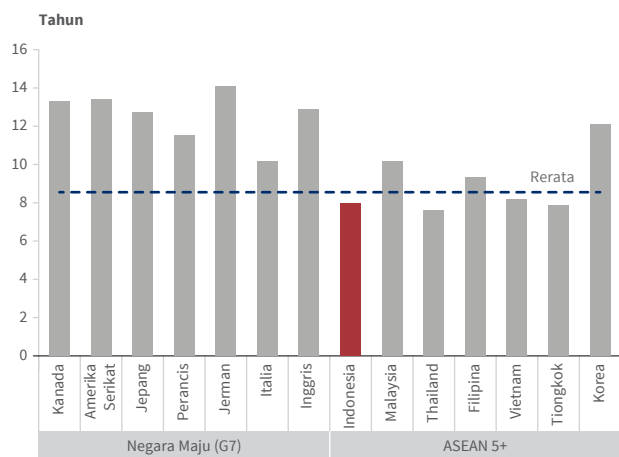
Grafik 10.11. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Sumber: UNDP, 2018

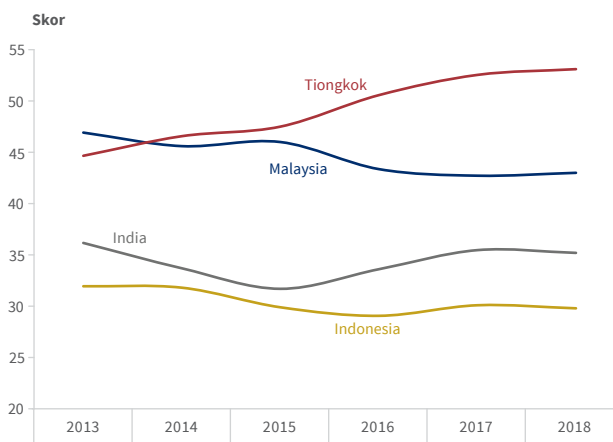
Sejalan dengan penguatan elemen SDM, penguatan elemen adopsi teknologi juga terus diperkuat sehingga dapat menopang daya saing perekonomian. Dalam hubungan ini, kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) yang diinisiasi baik oleh Pemerintah maupun swasta terus diperkuat, termasuk terkait jumlah tenaga kerja riset. Ketersediaan jumlah tenaga kerja berkeahlian tinggi dan kegiatan litbang pada gilirannya akan memengaruhi produktivitas, serta penguasaan teknologi dan inovasi di Indonesia ke depan. Saat ini, ruang peningkatan inovasi masih terbuka dimana indeks inovasi Indonesia saat ini masih di bawah Malaysia, Tiongkok, dan India (Grafik 10.12).

Grafik 10.10. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah



Sumber: UNDP, 2018

Grafik 10.12. Perbandingan Indeks Inovasi



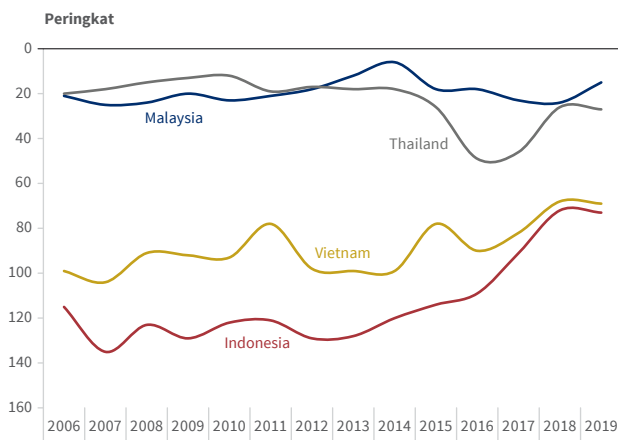
Sumber: Global Innovation Index

6 Affandi, Y., Anugrah, D. F., dan Bary, P., "Human capital and economic growth across regions: A case study in Indonesia", Eurasian Economic Review, DOI: <https://doi.org/10.1007/s40822-018-0114-4>.

Pada aspek dukungan kelembagaan, upaya perbaikan kemudahan berusaha, serta tata kelola dan birokrasi yang efisien bagi iklim usaha terus dilakukan. Indeks kemudahan berusaha Indonesia menunjukkan perkembangan yang terus membaik dan mendorong peringkat *ease of doing business* (EoDB) Indonesia naik cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peringkat EoDB pada 2018 terus membaik, meskipun turun satu peringkat (Grafik 10.13). Kualitas tata kelola pemerintah juga menunjukkan perkembangan yang positif. Laporan *governance indicator* 2018 yang dirilis Bank Dunia menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia mengalami perbaikan khususnya di bidang pengendalian korupsi, efektivitas pemerintahan, dan kualitas regulasi, sedangkan aspek stabilitas politik dan kepastian hukum perlu terus diperkuat (Grafik 10.14).

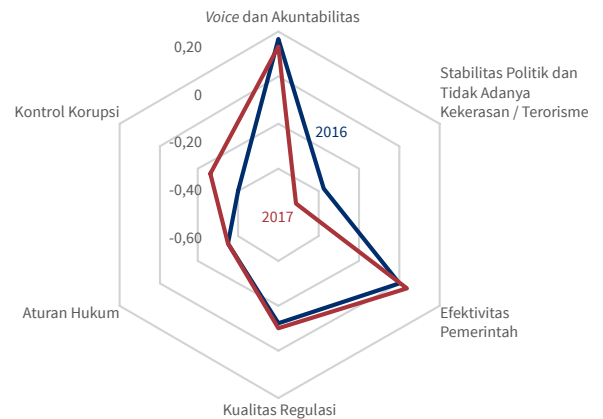
Dalam kaitan dengan perbaikan kemudahan berusaha, penerapan *online single submission* (OSS) pada 2018 yang diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai rangkaian proses perizinan berusaha secara elektronik merupakan langkah positif. Beberapa kendala dalam implementasi OSS, termasuk diantaranya dukungan petunjuk teknis bagi pengguna hingga integrasi dengan proses perizinan di daerah, menjadi bagian upaya penyempurnaan ke depan. Penyempurnaan juga terkait untuk memastikan kehandalan sistem, termasuk kemampuan SDM pengelolanya agar implementasi OSS tersebut dapat berjalan dengan baik. Perbaikan juga dilakukan pada beberapa aspek yang masuk dalam survei kemudahan berusaha atau EoDB oleh Bank Dunia, antara lain pembayaran pajak dan penyelesaian sengketa dagang.

Grafik 10.13. Peringkat Kemudahan Berusaha



Sumber: Ease of Doing Business, World Bank

Grafik 10.14. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Indonesia



Sumber: World Bank

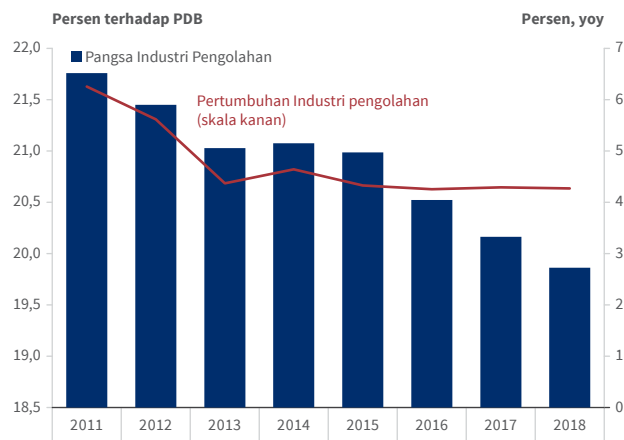
Mengembangkan Kapasitas dan Kapabilitas Industri

Reformasi struktural juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri pengolahan. Upaya ini ditempuh melalui hilirisasi industri untuk peningkatan nilai tambah dari pengolahan SDA. Pengembangan industri akan mengarah pada industri berbasis teknologi menengah dan tinggi yang didukung oleh peningkatan kapasitas SDM dengan mengoptimalkan bonus demografi. Upaya pengembangan industri akan tetap memerhatikan karakteristik dan potensi di setiap daerah (Selengkapnya lihat Boks 10.2 Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah). Secara keseluruhan, pengembangan industri akan diarahkan untuk mendukung peningkatan ekspor dengan memanfaatkan rantai nilai regional dan global.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas industri sangat penting dilakukan karena berkaitan erat dengan penguatan struktur ekonomi Indonesia. Upaya ini menjadi strategis karena pertumbuhan sektor industri dalam tren menurun pascakrisis 1997/1998 (Grafik 10.15). Pangsa sektor industri juga berada dalam tren yang terus menurun di tengah pengalaman negara-negara di kawasan seperti Malaysia dan Thailand yang mengalami peningkatan.

Peningkatan peran sektor industri dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor. Hal ini penting karena kapasitas dan kapabilitas industri yang masih terbatas menyebabkan komposisi impor yang cukup besar dalam mendukung kegiatan produksi domestik. Kondisi ini berimplikasi pada upaya untuk memacu pertumbuhan

Grafik 10.15. Pertumbuhan dan Pangsa Industri Pengolahan Indonesia



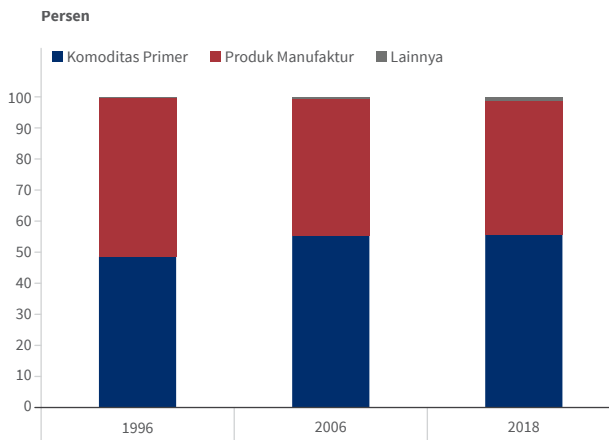
Sumber: BPS, diolah

ekonomi cenderung akan diikuti oleh kenaikan impor yang tinggi, sehingga dapat berpotensi memicu ketidakseimbangan eksternal.

Ketergantungan terhadap kebutuhan bahan baku dan barang modal yang harus dipenuhi dengan impor, berdampak pada kenaikan impor di kedua jenis kelompok barang. Hal ini juga menunjukkan ketidakseimbangan antara kapasitas industri hulu sebagai penyedia bahan baku dan antara, dengan kapasitas industri hilir. Meningkatnya penduduk kelas menengah Indonesia juga mendorong peningkatan permintaan barang konsumsi dengan jenis yang makin kompleks. Di tengah kapasitas dan kapabilitas industri domestik yang masih terbatas dalam memproduksi barang kompleks tersebut, meningkatnya permintaan dari kelas menengah ini juga turut mendorong kenaikan impor.

Peningkatan kapasitas sektor industri juga dapat memperkuat komposisi ekspor Indonesia. Data menunjukkan komposisi ekspor komoditas primer dan produk berbasis SDA terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan dekade sebelumnya (Grafik 10.16). Hal ini menyebabkan kinerja ekspor Indonesia rentan dipengaruhi oleh gejolak harga komoditas global. Pada periode harga komoditas yang tinggi, kinerja ekspor Indonesia juga tumbuh tinggi, sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pada saat harga komoditas mengalami penurunan yang dalam seperti tahun 2009, kinerja ekspor juga menjadi terbatas (Grafik 10.17). Dalam kaitan ini, upaya untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas industri perlu ditempuh melalui penguatan strategi pengembangan ekonomi daerah yang

Grafik 10.16. Komposisi Ekspor Indonesia

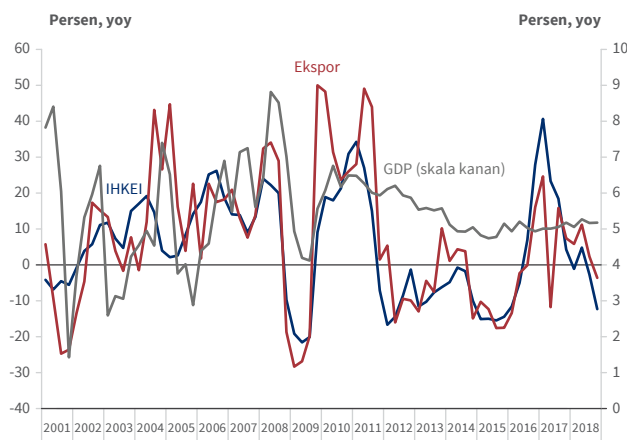


Sumber: World Bank, diolah

didasarkan atas potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri juga berkaitan dengan mendorong berkembangnya diversifikasi produk ekspor. Indonesia termasuk negara dengan tingkat diversifikasi produk ekspor rendah dan bergantung pada ekspor komoditas. Saat ini, komoditas ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas primer. Hal ini mengakibatkan terbatasnya pasar tujuan ekspor Indonesia. Dibandingkan Indonesia, komoditas ekspor negara peer seperti Malaysia, Thailand dan Filipina, lebih berkembang ke arah industri manufaktur dan bukan komoditas ekstraktif. Negara-negara tersebut juga memanfaatkan rantai nilai global di Asia

Grafik 10.17. Kinerja Ekspor dan Ekonomi Indonesia



Sumber: Bank Indonesia dan World Bank, diolah

Tenggara untuk meningkatkan perannya di perdagangan internasional.

Secara keseluruhan, berbagai gambaran tersebut berimplikasi Indonesia perlu mendorong sektor manufaktur untuk berkembang lebih cepat, khususnya industri berteknologi menengah dan tinggi yang dapat menghasilkan produk ekspor bernilai tambah tinggi. Arah kebijakan ini selaras dengan upaya untuk menempatkan Indonesia pada kategori negara berpendapatan menengah atas. Data dari 25 negara selama lebih dari dua dekade menunjukkan bahwa pendapatan per kapita meningkat seiring dengan kenaikan tenaga kerja yang bekerja di sektor industri pengolahan (Grafik 10.18). Dalam perkembangannya, secara berangsur peningkatan peran industri pengolahan akan bergeser ke sektor jasa, yang disertai dengan peningkatan pendapatan per kapita. Studi oleh Eichengreen, Park, dan Shin (2014) menunjukkan suatu negara perlu mengembangkan industrinya menuju industri berteknologi menengah-tinggi yang ditopang kualitas modal manusia guna menjadi negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi.⁷

Mengoptimalkan Pemanfaatan Ekonomi Digital

Reformasi struktural juga dikaitkan dengan upaya mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi digital mempertimbangkan berbagai aspek positif yang dimilikinya. Perkembangan ekonomi digital di satu sisi memberikan peluang bagi perekonomian, yaitu antara

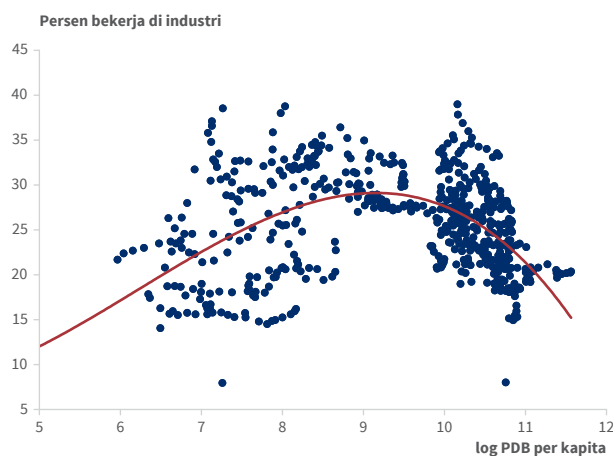
lain membuka kesempatan kerja baru, mendorong pembentukan harga yang lebih efisien, serta memberikan akses lebih luas terhadap pilihan barang dan jasa bagi konsumen. Selain itu, teknologi digital dan ekonomi digital juga dapat meningkatkan produktivitas melalui peningkatan efisiensi di berbagai aspek. Namun, pesatnya perkembangan ekonomi digital di sisi lain tetap perlu dikelola dengan baik karena juga diikuti sejumlah risiko bagi perekonomian. Dalam kaitan ini, ekonomi digital yang berkembang pesat perlu dikelola secara berimbang untuk mengoptimalkan peluang yang diberikan sekaligus memitigasi risiko yang mungkin timbul.

Perkembangan ekonomi digital yang mendorong perubahan struktur tenaga kerja terjadi seiring dengan menurunnya harga teknologi (Morin, 2015).⁸ Di satu sisi, kebutuhan tenaga kerja di sektor tertentu kemungkinan berkurang dengan adanya otomasi. Namun, di sisi lain akan mendorong peluang perpindahan tenaga kerja menuju pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan interaksi sosial tinggi. Ekonomi digital juga memberi kesempatan bagi tenaga kerja sektor informal masuk ke sektor formal. Kondisi ini memberikan gambaran potensi perubahan struktur kebutuhan tenaga kerja dari pesatnya perkembangan ekonomi digital. Untuk itu, upaya untuk mendorong peningkatan literasi digital sebagai bagian dalam upaya penyediaan SDM yang berkeahlian tinggi makin perlu menjadi perhatian.

Ekonomi digital juga membuat peluang yang lebih besar untuk efisiensi pasar, namun pada saat yang sama juga membuat persaingan usaha menjadi sangat ketat. Teknologi digital membentuk masa depan investasi dan perdagangan *cross-border*. Teknologi digital mendorong berkembangnya model bisnis baru dan juga memungkinkan perusahaan beroperasi secara global tanpa harus melakukan investasi langsung dalam jumlah besar. Makin berkembangnya internet dan teknologi digital telah secara langsung mentransformasi pola perdagangan barang dengan basis konsumen yang makin luas. Namun, teknologi digital juga membuat persaingan menjadi makin ketat. Hal ini menjadi tantangan apabila pesatnya perkembangan ekonomi digital tidak diimbangi peningkatan kemampuan dan daya saing pelaku usaha.

Terakhir, ekonomi digital juga dapat mendorong ekonomi lebih inklusif. Hal ini menjadi perhatian karena perkembangan teknologi digital telah mendorong

Grafik 10.18. Pangsa Tenaga Kerja yang Bekerja di Sektor Industri dan Tingkat Pendapatan



7 Eichengreen, B., Park, D., and Shin, K., "Growth Slowdowns Redux", Japan and the World Economy, Vol.32, November 2014, Pages 65-84.

8 Morin, M. (2015). "The labor market consequences of technology adoption: concrete evidence from the Great Depression". Unpublished manuscript, University of Cambridge

aksesibilitas masyarakat lebih baik, sehingga memberikan peluang bagi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan, termasuk usaha berskala kecil dan menengah. Dalam konteks ini, perkembangan ekonomi digital perlu diimbangi dengan peningkatan literasi bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatannya untuk pengembangan usaha terutama bagi UMKM.

Memperluas Sumber Pembiayaan Ekonomi

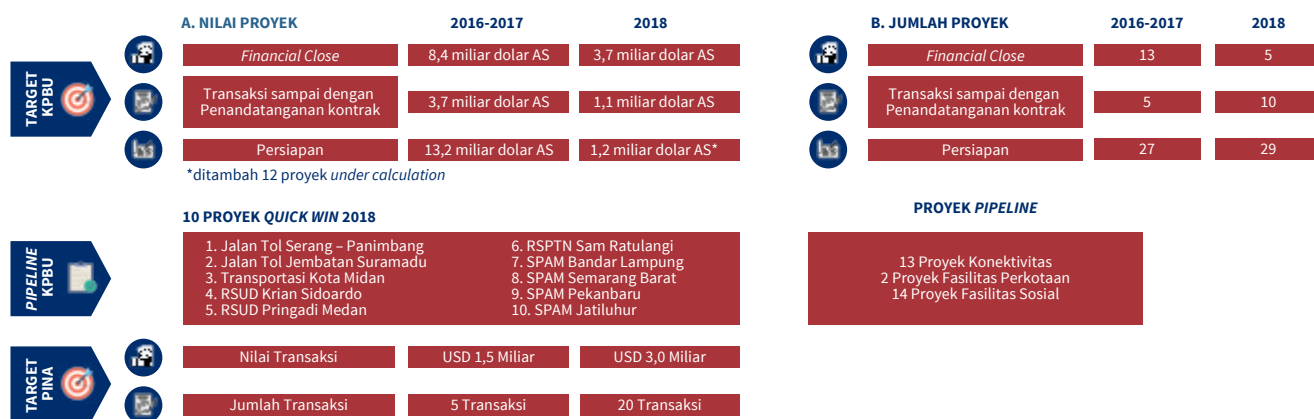
Reformasi struktural juga menyentuh upaya untuk memperluas sumber pembiayaan ekonomi yang berkesinambungan, termasuk melalui kebijakan pendalaman pasar keuangan. Berbagai langkah kebijakan dan upaya telah ditempuh guna mengoptimalkan struktur pembiayaan sekaligus menyediakan alternatif sumber pembiayaan ekonomi. Sejalan dengan kebijakan pendalaman pasar keuangan, Pemerintah terus mendorong partisipasi swasta melalui pengembangan skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif. Pemerintah juga terus melanjutkan pengembangan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan pembiayaan infrastruktur non-APBN (PINA). Skema pembiayaan tersebut diarahkan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur terutama proyek strategis nasional, seperti jalan tol, energi, telekomunikasi, dan penyediaan air, serta sektor lain seperti kereta api, bandara, pengelolaan limbah, dan rumah sakit (Gambar 10.2). Di samping itu, Pemerintah mengembangkan skema pembiayaan *blended finance* yang melibatkan pihak swasta dan industri jasa keuangan

untuk mendukung proyek-proyek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Ke depan, upaya perluasan sumber pembiayaan ekonomi nasional perlu terus dilakukan. Hal ini ditempuh mempertimbangkan besarnya kebutuhan pendanaan pembangunan nasional sebagaimana terlihat antara lain dari kebutuhan pendanaan investasi, khususnya infrastruktur, yang diperkirakan mencapai hingga 1,7 triliun dolar AS pada 2040.⁹ Di samping kebutuhan untuk belanja infrastruktur, Indonesia juga memerlukan kesinambungan pembiayaan untuk penyelenggaraan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam kaitan ini, tantangan untuk memperkuat struktur sumber pembiayaan yang berkesinambungan berkaitan dengan upaya mendorong partisipasi peran swasta melalui upaya pendalaman pasar keuangan domestik.

Perluasan sumber pembiayaan ekonomi juga terus dilakukan mempertimbangkan komposisi sumber pendanaan yang masih didominasi dana jangka pendek, baik dana perbankan maupun obligasi. Peran industri perbankan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan ekonomi untuk jangka lebih panjang masih terbatas sejalan dengan sumber dana yang dihimpun sebagian besar masih bersifat jangka pendek. Hal ini terlihat dari sumber dana perbankan domestik yang masih didominasi simpanan dengan tenor hingga 1 bulan dengan porsi sekitar 76% dari total DPK. Kondisi ini menyebabkan kemampuan perbankan domestik dalam menyalurkan pembiayaan yang bersifat jangka panjang

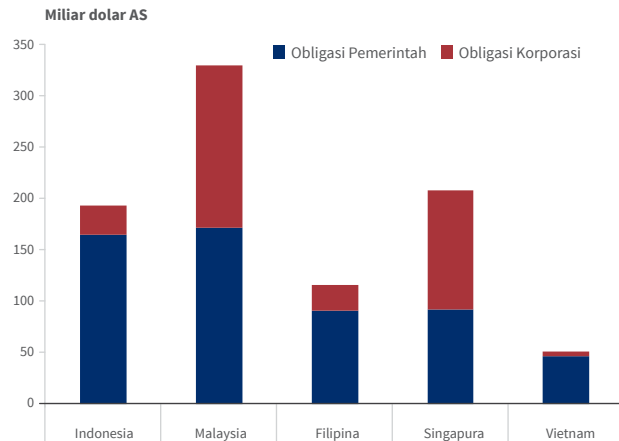
Gambar 10.2. Target dan Capaian KPBU dan PINA



Sumber: Bappenas

9 Global Infrastructure Hub (GI Hub).

Grafik 10.19. Volume Perdagangan Obligasi di Pasar Sekunder

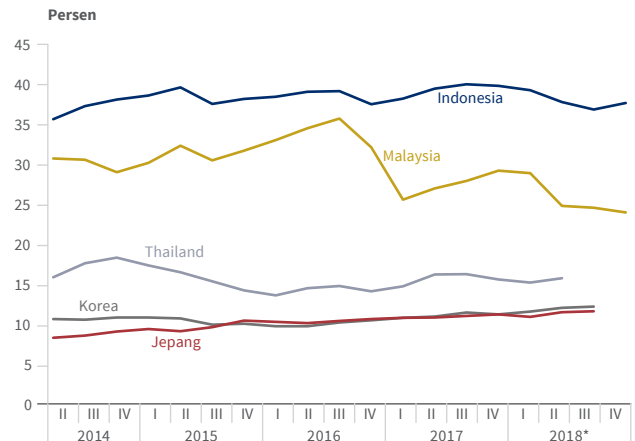


Sumber: ADB

menjadi terbatas. Sementara itu, sumber pembiayaan jangka panjang dari pasar obligasi juga masih perlu terus didorong sejalan dengan kapasitas dan likuiditas pasar obligasi korporasi yang masih rendah. Hal ini tampak dari volume perdagangan obligasi yang masih rendah bila dibandingkan dengan negara lain di kawasan seperti di Malaysia dan Singapura (Grafik 10.19).

Perluasan sumber pembiayaan juga berkaitan dengan upaya meningkatkan basis investor domestik.

Grafik 10.20. Pangsa Kepemilikan Asing pada Obligasi Pemerintah



Sumber: Kementerian Keuangan, Bank of Thailand, ADB, diolah

Perkembangan terkini menunjukkan peran investor asing sebagai sumber pembiayaan cukup besar. Hal tersebut tercermin dari komposisi dana asing dalam SBN yang cukup besar yakni sebesar 37%. Besaran pangsa dana asing dalam SBN tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sejumlah negara di kawasan (Grafik 10.20). Di tengah makin terintegrasinya pasar keuangan domestik dengan global, maka dinamika di pasar keuangan global akan turut berdampak pada pasar keuangan domestik.

Pariwisata untuk Meningkatkan Devisa

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan devisa dan mendukung penguatan neraca jasa, sekaligus mendukung penyerapan tenaga kerja yang lebih luas. Selain itu, pengembangan pariwisata juga merupakan upaya diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. Ke depan, ruang peningkatan penerimaan devisa pariwisata masih terbuka seiring dengan keberadaan potensi pariwisata di berbagai daerah yang masih belum dikembangkan secara optimal. Pengembangan pariwisata Indonesia dapat bercermin pada pengembangan pariwisata Thailand yang memiliki kinerja pariwisata terkuat di kawasan.¹ Untuk itu, Indonesia perlu memerhatikan perbaikan sejumlah faktor utama pembentuk daya saing pariwisata, khususnya yang saat ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara *peer*, khususnya Thailand.² Faktor utama tersebut antara lain mencakup infrastruktur konektivitas terutama angkutan udara, infrastruktur jasa pariwisata termasuk amenities, iklim berusaha, kualitas SDM, dan layanan sistem pembayaran.

Pemerintah telah menetapkan pencapaian kinerja pariwisata yang optimis dalam jangka pendek-menengah. Untuk itu, Pemerintah menentukan sejumlah destinasi wisata utama yang menjadi target *branding* pariwisata nasional dan 4 destinasi sebagai prioritas pengembangan pariwisata ke depan. Destinasi wisata utama seperti Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, Banyuwangi, dan Bromo memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitasnya dan menjaga daya saing pariwisata Indonesia secara keseluruhan. Sementara itu, pengembangan destinasi pariwisata difokuskan pada 4 destinasi prioritas yakni Danau Toba, Candi Borobudur, kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, dan Labuan Bajo agar dapat segera berkontribusi bagi peningkatan devisa.

Akselerasi pengembangan pariwisata Indonesia dapat dilakukan melalui implementasi tiga strategi utama yang mencakup aspek perbaikan destinasi, akses pasar, kelembagaan maupun ekosistem usaha pariwisata (Gambar 1). Pertama, strategi penguatan atraksi, akses, dan amenities (3A). *Penguatan kualitas atraksi*, dikaitkan dengan strategi untuk menjaga kualitas dan kelestarian destinasi serta mendorong peningkatan belanja wisman. *Peningkatan aksesibilitas*, peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas perlu terus diupayakan di berbagai destinasi terutama pada destinasi prioritas yang masih dalam tahap pengembangan. *Peningkatan kualitas amenities*, diperlukan upaya peningkatan kenyamanan berwisata antara lain berupa perbaikan kualitas akomodasi, restoran, jasa transportasi lokal terpercaya, kebersihan, dan infrastruktur pembayaran. Kedua, strategi penguatan promosi dalam rangka mendukung pemasaran pariwisata yang efektif, serta mendukung konsistensi peningkatan *brand awareness* pariwisata Indonesia. Ketiga, strategi penguatan koordinasi pengembangan pariwisata dan penguatan pelaku usaha pariwisata, termasuk dukungan ketersediaan SDM dan pembiayaan usaha pariwisata. Hal ini terutama untuk mendukung berkembangnya ekosistem pariwisata di destinasi yang berada di luar Jawa-Bali.

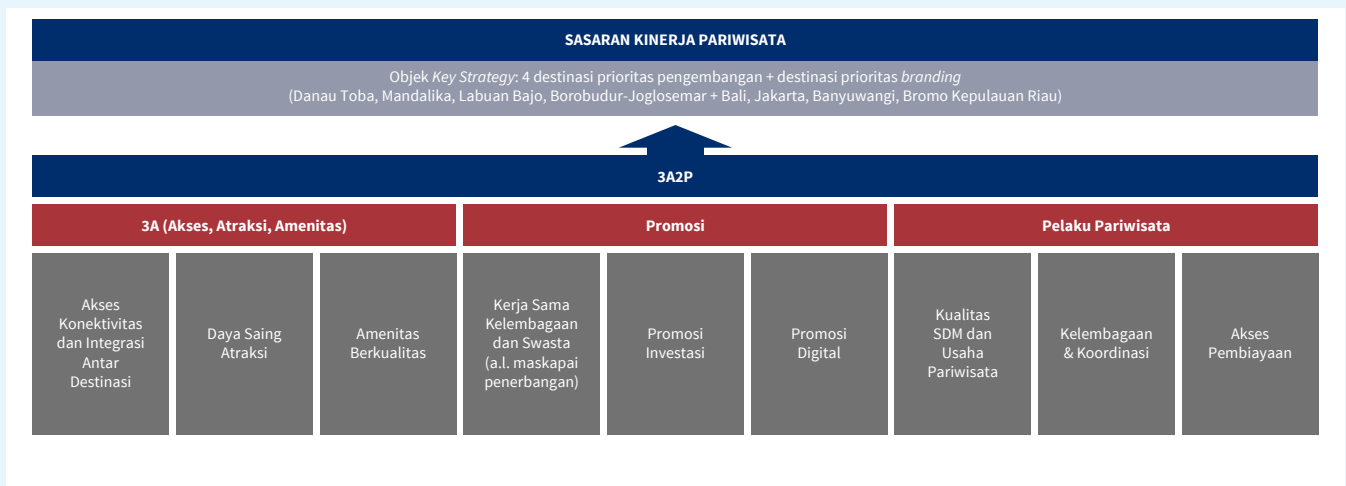
Pengembangan pariwisata juga harus didukung oleh penguatan promosi pariwisata dan ketersediaan data pariwisata yang terpercaya dan terkini. Pemasaran destinasi dan *branding* pariwisata Indonesia harus dikelola secara profesional dan konsisten agar mendapatkan *market awareness* yang berkelanjutan (Gambar 2). Promosi ke pasar potensial seperti negara asal wisman yang mengunjungi negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 6 lainnya di luar Indonesia dan wisatawan asal Timur Tengah perlu diupayakan. Selain itu, strategi penguatan kerja sama kelembagaan antara lain dengan jasa penerbangan perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan kunjungan.

Sinergi antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta masyarakat dan sektor swasta perlu terus diperkuat. Upaya strategis yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan pariwisata perlu terus dikawal dan diakselerasi, antara lain terkait peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas, peningkatan akses pembiayaan pariwisata, serta langkah penguatan pengelolaan destinasi dan SDM pariwisata.

1 Jumlah kunjungan wisman Thailand pada 2017 sebesar 35 juta kunjungan, lebih tinggi dari Indonesia (14 juta kunjungan).

2 Variabel daya saing pariwisata berdasarkan publikasi *Travel and Tourism Competitiveness Index 2017* oleh World Economic Forum. Peringkat daya saing Indonesia 2017 menempati peringkat 42, lebih rendah dari Thailand (34) dan Malaysia (26).

Gambar 1. Strategi Pengembangan Pariwisata Indonesia

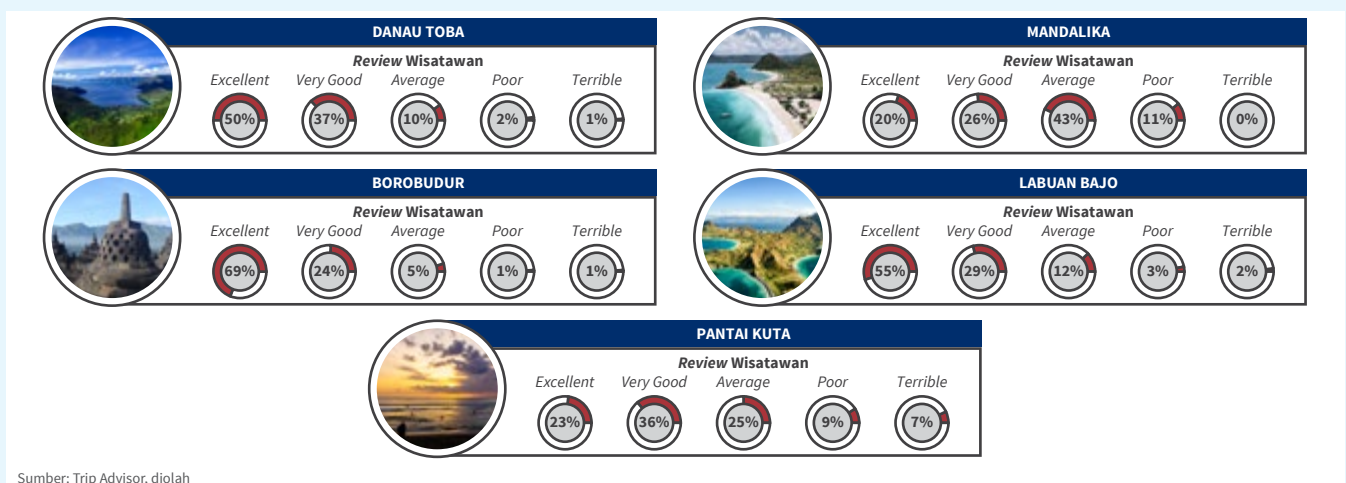


Bank Indonesia akan terus memberikan dukungan pengembangan pariwisata nasional dalam koridor penguatan struktur perekonomian dan perbaikan neraca transaksi berjalan. Sejumlah langkah sedang diupayakan Bank Indonesia antara lain optimalisasi peran IRU dalam mendukung investasi pariwisata, pengembangan *halal value chain* untuk mendukung *halal tourism*, serta pengembangan UMKM yang mendukung pengembangan pariwisata daerah.

Peningkatan kualitas sistem pembayaran secara kontinu terus dilakukan oleh Bank Indonesia, antara lain untuk mendukung pengembangan destinasi prioritas

pariwisata. Sejumlah langkah dalam rangka intensifikasi penyediaan layanan sistem pembayaran antara lain melalui perluasan kanal pembayaran dan penggunaan instrumen nontunai. Peningkatan kemudahan fasilitas pembayaran nontunai atas akomodasi dan sarana pariwisata merupakan salah satu langkah awal untuk mendorong perluasan penggunaan akses sistem pembayaran nontunai di destinasi pariwisata. Selanjutnya, peningkatan kemudahan transaksi pembayaran melalui layanan elektronifikasi pembayaran akan membuka akses usaha ritel yang lebih luas kepada wisatawan dan mendukung peningkatan devisa pariwisata.

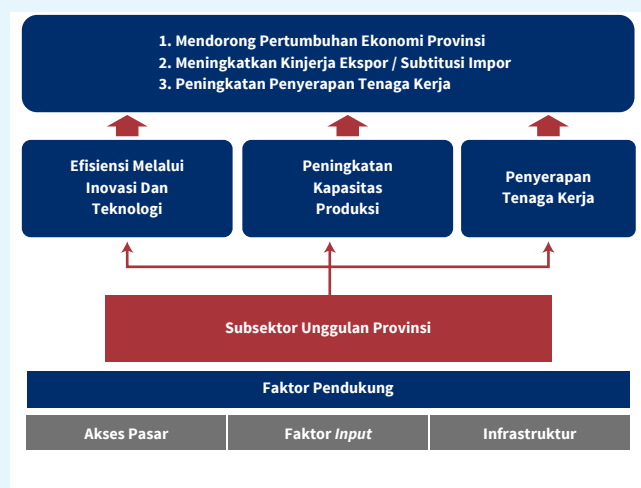
Gambar 2. Persepsi Pengalaman Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding



Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah

Perekonomian Indonesia terus tumbuh membaik secara gradual dan mencapai 5,17% pada 2018. Upaya untuk memperkuat struktur ekonomi agar dapat tumbuh lebih tinggi menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia saat ini. Lebih lanjut, struktur ekonomi yang kuat secara nasional juga harus ditopang dari perekonomian daerah melalui sektor utama pendorong perekonomian di masing-masing provinsi. Riset *Growth Strategy* oleh Bank Indonesia (2018) mengidentifikasi peluang peningkatan peran subsektor yang memiliki keunggulan di masing-masing daerah dalam mendorong perekonomian.¹ Identifikasi terhadap sektor (atau subsektor) potensial di daerah dapat dilihat dari sisi kontribusinya terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Perumusan strategi disusun dengan melihat aspek akses pasar, faktor *input* (teknologi, kapital dan tenaga kerja), dan infrastruktur (Gambar 1). Lebih lanjut, pengembangan sektor (atau subsektor) ditempuh melalui strategi yang secara garis besar menekankan pada efisiensi produksi, peningkatan kapasitas produksi, dan penyerapan tenaga kerja.

Gambar 1. Kerangka Analisis *Growth Strategy*



Hasil identifikasi menunjukkan masing-masing wilayah memiliki subsektor prioritas yang berbeda sesuai dengan karakteristik perekonomian daerah. Subsektor prioritas di wilayah Sumatera cenderung berbasis komoditas alam dan pengolahannya, antara lain: (i) perkebunan, misalnya kelapa sawit, kopi, dan kakao; (ii) industri makanan dan minuman (mamin), misalnya CPO dan buah-buahan; dan (iii) perikanan. Tidak jauh berbeda, subsektor prioritas di wilayah Kawasan Indonesia Timur (KTI) juga berbasis komoditas alam seperti perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), perkebunan, dan pertambangan (batubara, nikel, dan tembaga). Sebaliknya, wilayah Jawa lebih didominasi subsektor berbasis industri manufaktur, antara lain industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri otomotif, industri mamin, dan industri alas kaki (Gambar 2).

Dengan subsektor prioritas yang berbeda di tiap wilayah, maka strategi untuk masing-masing provinsi juga akan berbeda dalam mengembangkan perekonomiannya. Sebagai contoh di wilayah Sumatera, subsektor perkebunan (kelapa sawit) memberikan pengaruh yang signifikan pada peningkatan pertumbuhan PDRB dan ekspor, serta peningkatan serapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara.² Pengembangan subsektor perkebunan akan meningkatkan pertumbuhan PDRB dan ekspor masing-masing sebesar 0,29% dan 0,45% di atas *baseline*.³ Dengan demikian, perlu dilakukan upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit antara lain melalui: (i) meningkatkan produktivitas lahan dengan melaksanakan program *replanting*; dan (ii) perluasan kemitraan petani dengan pengusaha melalui skema inti plasma. Dari wilayah KTI, salah satu subsektor unggulannya yaitu subsektor perikanan. Pengembangan subsektor perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya, yaitu sebesar 0,24% di atas *baseline*.⁴ Strategi untuk pengembangan daerah yang diarahkan pada subsektor perikanan seperti: (i) pengembangan sistem pembinaan dan penyuluhan pada nelayan; dan (ii) peningkatan

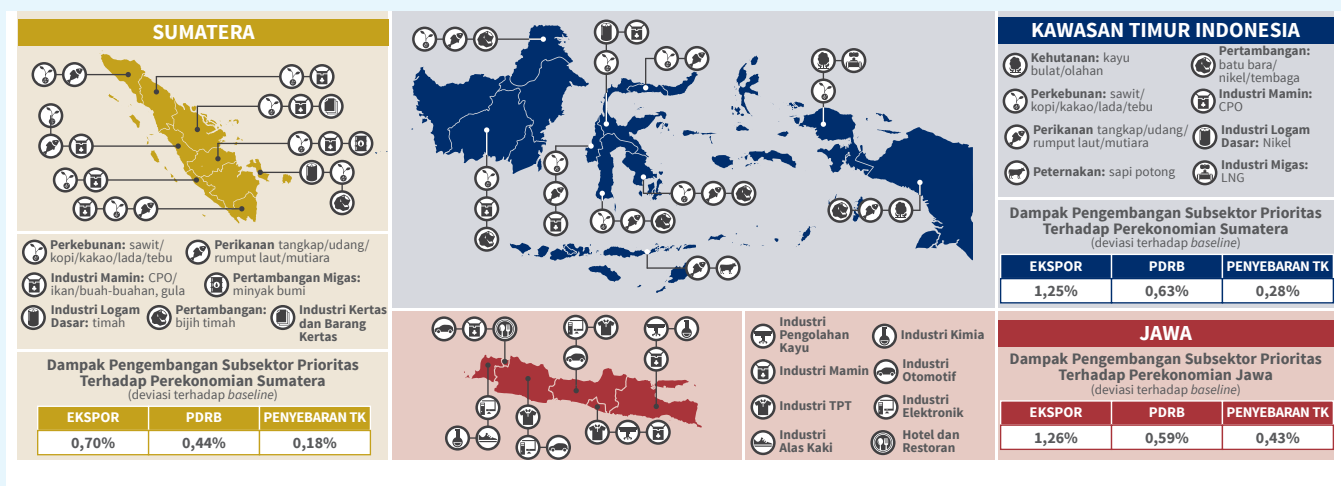
¹ Riset *Growth Strategy* yang mencakup 24 provinsi di Indonesia merupakan pengembangan dari riset *Growth Diagnostic* (Bank Indonesia, 2016).

² Harahap, S.A.R., Prakasa, R.R., Anugrah, D.F., dan Rahayu, R.R. (2018) *Growth Strategy* di Provinsi Sumatera Utara

³ *Baseline* merupakan kondisi acuan tanpa adanya kebijakan tertentu guna mengukur atau membandingkan dampak suatu kebijakan.

⁴ Andriani, R., Siburian, E.M.D., Pratama, R., dan Anugrah, D.F. (2018) *Growth Strategy* di Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 2. Hasil Riset *Growth Strategy*



pemanfaatan lahan budidaya (ikan, udang dan rumput laut). Peran sektor berbasis sumber daya alam yang cukup besar di wilayah ini perlu diarahkan untuk dapat memberikan nilai tambah lebih tinggi, khususnya melalui pengembangan hilirisasi.

Berbeda dengan wilayah Sumatera dan KTI, sektor industri pengolahan cukup mendominasi di wilayah Jawa. Salah satu industri yang menonjol antara lain industri TPT yang merupakan jenis industri padat karya. Pengembangan faktor *input* pada industri TPT dapat mendorong kenaikan pertumbuhan PDRB sebesar 0,37% dan tambahan serapan tenaga kerja sebesar 0,22% di Provinsi Jawa Barat.⁵ Untuk itu, strategi pengembangan perekonomian provinsi tersebut salah satunya dengan meningkatkan kinerja industri TPT. Terkait dengan hal itu, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: (i) peningkatan kualitas modal manusia melalui pendidikan/keterampilan; dan (ii) penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas.

Secara spasial, pengembangan subsektor ekonomi prioritas di masing-masing wilayah memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang signifikan. Pengembangan subsektor prioritas pada masing-masing wilayah memberikan dampak kenaikan pertumbuhan PDRB rata-rata sebesar 0,63% (KTI), 0,59% (Jawa), dan 0,44% (Sumatera) di atas *baseline*. Apabila dilihat pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekspor, wilayah Jawa memiliki potensi tertinggi dibandingkan wilayah lainnya dengan dampak peningkatan sebesar 0,43% (tenaga kerja) dan 1,26% (ekspor) di atas *baseline*. Secara keseluruhan, penguatan perekonomian daerah perlu dimulai dengan penyusunan strategi pengembangan subsektor prioritas di masing-masing daerah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berlandaskan potensi daerahnya. Pada akhirnya, pengembangan subsektor prioritas pada masing-masing daerah diharapkan juga berperan untuk memperkuat transaksi berjalan secara nasional, di samping mendorong perekonomian daerah itu sendiri.

⁵ Pamungkas, W.P., Parenrengi, N.P.A., dan Anugrah, D.F. (2018) *Growth Strategy* di Provinsi Jawa Barat

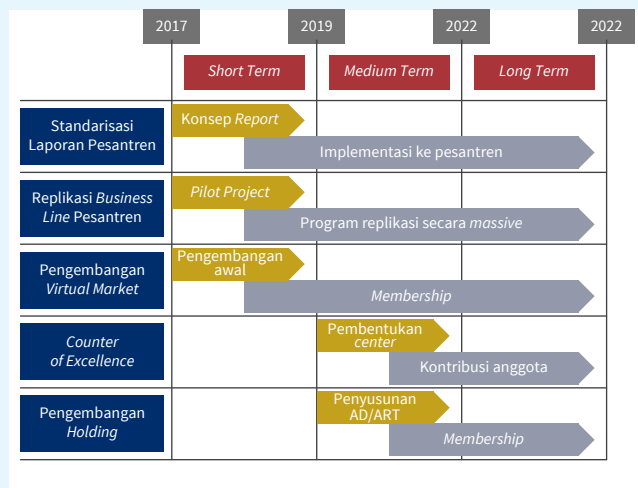
Boks 10.3.

Penguatan Landasan Pengembangan Ekonomi Syariah

Dalam peta jalan pelaksanaan *Blueprint* Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, tahun 2018 merupakan tahap akhir peletakan pondasi program pengembangan. Pada tahap ini, berbagai program telah menghasilkan berbagai pencapaian dari implementasi yang berkelanjutan di setiap pilar strategi utama yang fokus pada tiga area pengembangan. Pilar pertama fokus pada strategi pengembangan ekonomi syariah nasional. Pilar kedua fokus pada pengembangan keuangan syariah melalui pendalaman pasar keuangan syariah untuk mendukung pembiayaan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, pilar ketiga fokus pada penguatan keilmuan melalui edukasi ekonomi dan keuangan syariah, serta peningkatan pemahaman masyarakat melalui program sosialisasi dan kampanye publik di berbagai wilayah Indonesia dengan melibatkan pihak internasional.

Pada pilar pertama, salah satu program yang dilakukan yaitu penguatan kemandirian ekonomi pesantren. Program ini merupakan bagian dari strategi pengembangan rantai nilai halal nasional untuk mendukung perbaikan struktur perekonomian. Program tersebut mencakup pengembangan secara integratif dan komprehensif dari seluruh faktor dalam ekosistem unit usaha pesantren. Misi dalam program tersebut yaitu: (i) meningkatkan kapasitas ekonomi pesantren dalam mengoptimalkan aset pesantren; (ii) meningkatkan terwujudnya *good governance* di lingkungan pesantren; (iii) meningkatkan kualitas SDM pengelola dan pengajar di lingkungan pesantren; dan (iv) menyusun program peningkatan kompetensi pada materi ajar (kurikulum). Keseluruhan misi ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan peta jalan (Gambar 1). Sejalan dengan peta jalan tersebut, telah dilakukan penguatan kapasitas pesantren melalui penerapan sistem akuntansi pesantren dan replikasi model bisnis usaha pesantren di beberapa sektor usaha. Di samping itu, penguatan kapasitas pesantren juga dilakukan melalui pengembangan *virtual market* sejalan dengan dinamika perkembangan teknologi digital untuk menjaga daya saing unit usaha pesantren.

Gambar 1. Peta Jalan Program Penguatan Ekonomi Pesantren

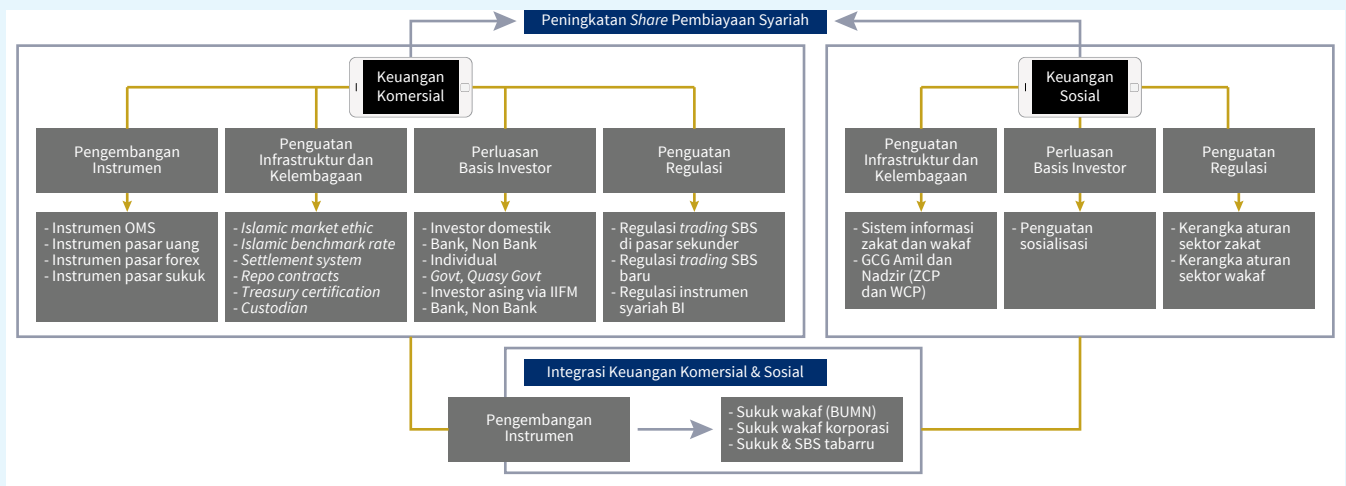


Program lain terkait strategi pengembangan rantai nilai halal yaitu penguatan usaha syariah melalui program penguatan berbasis produk dan pembiayaan. Pada program penguatan usaha syariah berbasis produk, tahap awal pengembangan difokuskan pada sektor fesyen muslim dan sektor industri makanan halal. Untuk mendorong pengembangan usaha syariah pada kedua sektor tersebut, Bank Indonesia bekerjasama dengan pelaku usaha syariah mendirikan *platform* industri kreatif syariah (IKRA) Indonesia.¹ *Platform* IKRA Indonesia bertujuan untuk menghasilkan *high end value* produk usaha syariah unggulan agar dapat berkompetisi dengan produk *brand* global. Selanjutnya, pada program penguatan usaha syariah berbasis pembiayaan, telah dilakukan pengembangan *pilot project* kelompok usaha syariah dengan sumber pembiayaan dari dana zakat infaq shadaqah wakaf (ZISWAF) di sektor pertanian. Replikasi akan terus dilakukan melalui pengembangan model bisnis dengan pembiayaan di sektor lainnya.

Pada pilar kedua, dilakukan pendalaman pasar keuangan syariah untuk mendukung pembiayaan pengembangan usaha syariah dalam rantai nilai halal pada pilar pertama. Strategi ini dilakukan dengan peningkatan variasi instrumen keuangan syariah, peningkatan daya tarik investor dan volume transaksi, serta penguatan regulasi dan infrastruktur (Gambar 2). Cakupan strategi pada pilar kedua ini meliputi program keuangan komersial dan program keuangan sosial syariah. Melalui strategi

¹ Bank Indonesia mendirikan IKRA Indonesia yang diluncurkan saat penyelenggaraan ISEF ke-5 tanggal 11 Desember 2018 di Surabaya bekerja sama dengan pelaku usaha syariah.

Gambar 2. Strategi Pendalaman Pasar Keuangan Syariah untuk Mendorong Pembiayaan



ini diharapkan terbentuk integrasi antara kedua sektor keuangan syariah tersebut, pada gilirannya dapat secara efektif menjangkau unit produksi yang belum mendapatkan akses keuangan yang optimal. Pencapaian program keuangan komersial ditandai dengan telah dihasilkannya beberapa instrumen keuangan syariah seperti sertifikat deposito berbasis syariah, SukBI, dan instrumen lindung nilai berdasarkan prinsip syariah.

Pengembangan program keuangan sosial syariah menggunakan pendekatan berbasis ekosistem. Sebagai salah satu bentuk pengembangan infrastruktur pendukung, telah dilakukan pengembangan *core principles* guna meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas sektor keuangan sosial syariah. Sejalan dengan *zakat core principles* yang telah diluncurkan sebelumnya tahun 2016, Bank Indonesia bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) meluncurkan *waqaf core principles* pada pertemuan tahunan IMF-WB 2018 di Bali. Di samping itu, kerja sama Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan dan BWI pada program pengembangan instrumen integrasi ini telah menghasilkan produk *cash waqaf-linked sukuk* (CWLS). Produk CWLS bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin berperan aktif dalam pembangunan fasilitas publik melalui dana wakaf tunai.

Pilar ketiga bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap konsep ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi sumber daya insani yang andal, profesional, dan berdaya saing internasional serta peningkatan pemahaman masyarakat melalui berbagai program sosialisasi yang menyeluruh dan terintegrasi. Dalam praktiknya, strategi ini ditempuh melalui penyusunan program edukasi yang memiliki relevansi kuat pada kebutuhan industri, pengembangan kurikulum, serta pengayaan program vokasi dan profesi. Pada program sosialisasi, Bank Indonesia menyelenggarakan ISEF yang telah berlangsung sebanyak lima kali. Pada dua tahun terakhir kegiatan ISEF bekerja sama dengan komite nasional keuangan syariah (KNKS), dan *stakeholder* syariah lainnya. Sebagai bagian dari penyelenggaraan ISEF 2018, Fesyar juga telah diselenggarakan di wilayah Jawa, Sumatera, dan Indonesia bagian timur. Berbagai program tersebut dilakukan mengingat pilar ketiga memegang peranan penting dalam mendukung program pada pilar pertama dan kedua. Keberhasilan seluruh program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sangat bergantung dari tingkat pemahaman masyarakat yang baik.

